

2025

RENCANA KERJA

**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Undata No 7 Palu , 94111

Telepon (0451) 421560, Faks (0451) 429379

Email : dkpprovsulteng@gmail.com Website : dkp.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan "**Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**" dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksana kegiatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Tahun 2025.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mensinergikan program pusat dan daerah dalam menyongsong visi dan misi pemerintah di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, 31 Januari 2024
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600418 199203 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pembangunan di Daerah diwajibkan untuk dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan dari keinginan masyarakat luas di daerah masing-masing dan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah memuat berbagai usulan dan rencana kerja serta program-program kegiatan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun 2025 ini pada dasarnya mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.

Menarik benang merah serta korelasi dan integrasi program dan kegiatan yang terpadu, sangat diperlukan lompatan pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja yang mumpuni, akuntabel, terupdate, dengan memperhatikan tolak ukur program/kegiatan berdasarkan output, outcome, benefit, dan impact dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengusung visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan cepat, baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Guna dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun 2025. Diharapkan dengan perencanaan yang baik dapat menjalankan program pembangunan daerah Sulawesi Tengah dengan cepat dan tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah);
25. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
27. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042;
28. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
33. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;

34. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai pedoman perencanaan bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.
- b. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 - 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L
- 2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2024 dan 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan III TA. 2023

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2023 DKP Sulteng telah menetapkan 4 sasaran strategis (SS) dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Persentase	Kode
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan	100,8	103,12	102,3	
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19,98	18,22	91,19	
3	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	3. Produksi perikanan (ton)	972.693,75	1.052.510,18	108,21	
		4. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	57,05	67,36	118,07	
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	5. Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	250	265	106	

* angka sementara

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

❖ IKU 1 Nilai tukar perikanan (NTP)

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani perikanan. NTP diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya). NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani perikanan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima

petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun dasar (2012=100) menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari Kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Tahun 2023 target Nilai Tukar Perikanan 100,80 dan terealisasi sebesar 103,12. Capaian ini melebihi target sebesar 102,3%.

Tabel 2. Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTP)
Sulawesi Tengah Tahun 2023

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTP
Januari	120,61	114,35	105,48
Februari	120,78	114,67	105,33
Maret	121,27	114,98	105,47
April	122,39	115,13	101,07
Mei	122,30	115,39	106,00
Juni	122,12	115,52	105,71
Juli	122,12	115,66	105,58
Agustus	122,37	115,71	105,75
September	122,17	115,97	105,34
Oktober	117,48	118,02	99,54
November	115,94	116,77	97,48
Desember	113,91	120,28	94,70
Rata-rata	120,29	116,04	103,12

Nilai tukar perikanan (NTP) berfluktuasi sepanjang tahun 2023, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani perikanan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib). Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa NTP terendah terjadi pada bulan Desember dan yang tertinggi terjadi pada bulan Mei. Meskipun NTP pada bulan Oktober sampai Desember berada dibawah 100 tetapi secara keseluruhan NTP 2023 berada di atas 100. Meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal yang tidak seimbang dengan indeks yang diterima oleh nelayan/pembudidaya yang cenderung menurun menjadi penyebab turunnya NTP triwulan akhir 2023.

Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

- ❖ IKU 2 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019.

Tahun 2023 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 19,98 dan teralisasi 18,22 atau sebesar 91,19%. Luas perairan Sulawesi Tengah sebesar 77.295,90 Km² dan luas kawasan konservasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 14.082,92 Km². Kawasan konservasi perairan Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kawasan Konservasi Perairan Sulawesi Tengah s.d. Tahun 2023

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)	Kegiatan
1.	DOBOTO	Donggala	1.192,34	Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove
		Toli-toli	56.250,08	Pengembangan Informasi Kawasan
		Buol	17.320,30	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang
LUAS KAWASAN			74.762,72	
2.	TOMINI	Parigi Moutong	131.693,59	Pengembangan Informasi Kawasan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove
		Poso	282,87	Pengembangan Informasi Kawasan
		Tojo Una-Una	7.563,40	Pengembangan Informasi Kawasan
LUAS KAWASAN			139.539,87	
3.	DALAKA	Banggai	111.253,93	Pengembangan Rehabilitasi Terumbu Karang
		Banggai	151.273,94	Pengaturan Waktu

		Kepulauan		Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		Banggai Laut	633.620,99	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		LUAS KAWASAN	896.148,86	
4.	MOROWALI	Morowali	257.612,03	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		Morowali Utara	41.983,07	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		LUAS KAWASAN	299.595,10	
		LUAS TOTAL	1.408.291,55	

Sasaran 3 Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing

❖ IKU 3 Jumlah Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya meliputi jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam, minapadi sawah, rumput laut, tambak dan budidaya laut lainnya. Produksi budidaya terbesar di dominasi oleh rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Komoditi unggulan perikanan tangkap di Sulawesi Tengah adalah ikan tongkol, tuna, cakalang (TTC) dan ikan demersal.

Tahun 2023 target produksi perikanan sebesar 972.693,75 ton dan terealisasi dengan angka sementara sebesar 1.052.510,18 ton* atau sebesar 108,21%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dimana salah satunya dapat disebabkan oleh efektifitas program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun 2023 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Produksi Perikanan Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan (Ton)*		
		Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total
1	Banggai Kepulauan	631.354,15	13.187,55	644.541,70
2	Banggai Laut	29.707,63	30.192,60	59.900,23
3	Banggai	623,88	196,88	820,76
4	Morowali	34.291,3	33.566,85	67.858,15
5	Morowali Utara	5.357,66	1.051,05	6.408,71
6	Poso	4.496,38	3.094,8	7.591,18
7	Donggala	21.778	143.891,82	165.669,82
8	Toli-toli	1.565,75	16.037,70	17.603,451
9	Buol	716,74	15.429,15	16.145,89
10	Parigi Moutong	24.378,23	31.162,59	55.540,87
11	Tojo Una Una	8.226,39	15,77	8.242,16
12	Kota Palu	124,75	1.163,10	1.287,85
13	Sigi	899,47		899,47
	T o t a l	763.520,32	288.989,86	1.052.510,18

❖ *IKU 4 Angka Konsumsi Ikan (AKI)*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 57,05 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 67,36 Kg/Kap/Th* atau 118,07%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II tahun 2024. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 57,6 Kg/Kap/Th. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan ini salah satunya merupakan dampak dari publisitas produk perikanan kelautan dan kampanye gemar makan ikan disamping imbas dari Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pesisir dimana ikan merupakan salah satu komoditas utama.

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2023 antara lain ikan tongkol/tuna/cakalang, selar, ekor kuning, kembung, cumi-cumi/sotong/gurita, udang/lobster, teri, bandeng, nila, mujair.

Sasaran Strategis 4 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Regulasi-Deregulasi terkait Pengelolaan SDKP

❖ *IKU 5 Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)*

Dalam menjaga kedaulatan wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan didukung oleh beberapa hal antara lain SDM pengawas, armada pengawasan dan lain sebagainya. Tahun 2023 target hari operasi pengawasan SDKP adalah 250 hari dan terealisasi 265 hari atau sebesar 106%.

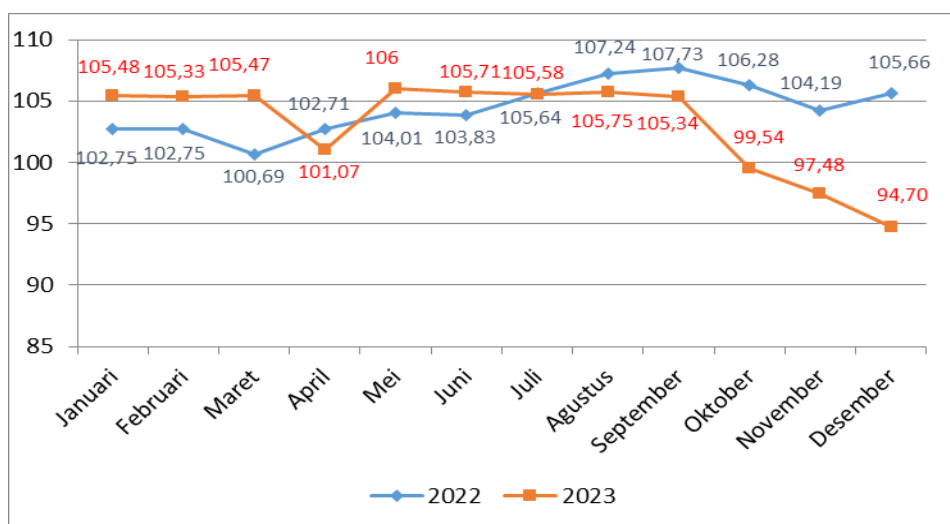
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelum

Capaian tahun 2023 ini akan dibandingkan dengan tahun 2022. Perbandingan capaian IKU Dinas tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran	Tahun		Kenaikan / Penurunan (%)
		2022	2023*	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Nilai Tukar perikanan (NTP) (%)	104,46	102,30	(2,07%)
2.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	18,22	18,22	-
3.	Produksi perikanan (ton)	925.623,14	1.052.510,18	13,71
4.	Angka konsumsi ikan (kg/kap/th)	67,36	67,36	-
5.	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	228	265	16,23

- *Nilai Tukar Perikanan (NTP)*, Perkembangan NTP Perikanan Sulteng bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (q to q), NTP Sulteng cenderung turun. Pada Tahun 2022 NTP sebesar 104,46 sedangkan Tahun 2023 sebesar 103,12 mengalami penurunan sebesar 2,07%. Akan tetapi, walaupun nilai ini turun tetapi angkanya masih diatas 100 yang artinya indeks harga yang diterima (It) lebih besar dari indeks harga yang dibayarkan (Ib). Grafik NTP tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. NTP Sulteng Tahun 2022 – 2023

- *Rasio Kawasan Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, nilai indikator ini untuk tahun 2022 dan 2023 sama, yakni 18,22.
- *Produksi Perikanan*, capaian produksi perikanan tahun 2023 meningkat 13,71% dari capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 produksi perikanan sebesar 921.126,40 ton dan pada tahun 2023 sebesar 1.052.510,18 ton. Meskipun begitu capaian tahun 2023 ini masih merupakan angka sementara dimana proses validasi data belum selesai, diperkirakan angka produksi ini masih akan naik;
- *Angka Konsumsi Ikan*, capaian untuk indikator ini masih sama antara tahun 2022 dan 2023 yakni 67,36 kg/kap/th. Diperkirakan capaian

tahun 2023 ini masih akan naik mengingat proses perhitungannya belum selesai.

- *Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP*, capaian pada indikator ini mengalami kenaikan 16,23% dari tahun sebelum, dimana pada tahun 2022 hari operasi dilaksanakan sebanyak 228 hari dan pada tahun 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 265 hari.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2023 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 6. Capaian IKU terhadap Renstra KP 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Capaian 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	67,44	66,00	102,18
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Perikanan (NTP) (%)	103,12	103,40	99,73
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	18,22	22,55	80,80
4	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (Ton)	1.052.510,18	1.596.764,28	65,91
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	67,36	62,35	108,03
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	265	400	66,25

Dari tabel diatas terlihat bahwa:

1. Capaian indikator *Nilai Tukar Perikanan (NTP)* tahun 2023 melebihi 102,30% dari target Renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan indeks yang diterima petani perikanan (It) lebih besar dari jumlah yang dibayarkan (Ib);
2. Capaian indikator *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial* belum mencapai target target renstra 2021-2026, dimana target adalah 19,98 dan tercapai 18,22 atau sebesar 91,19%. Sampai dengan tahun 2021 luas kawasan konservasi perairan di Sulawesi Tengah sebesar 1.338.291,55 Ha dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 70.000 Ha sehingga menjadi 1.408.291,55 Ha atau 14.082,92 Km2 pada tahun 2022;
3. Capaian indikator *Produksi Perikanan (Ton)* mencapai target renstra sebesar 108,21%, akan tetapi ini masih merupakan angka sementara dimana diperkirakan angka ini akan terus naik setelah proses validasi data antara daerah dan pusat selesai pada akhir triwulan I nanti.
4. Capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/Th)* melebihi 118,07% dari target renstra. Angka ini sama dengan capaian tahun sebelumnya

dimana angka pada tahun 2023 ini masih merupakan angka sementara dan diperkirakan masih akan naik pada akhir proses perhitungan.

5. Capaian indikator *Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)* telah melebihi target renstra yakni 106,00%. Selama tahun 2023 giat operasi dilaksanakan sebanyak 265 hari.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2023 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023*	Realisasi Nasional 2023*	% Capaian
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	67,44	-	-
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan (%)	103,12	105,22	98,00
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	18,22	-	-
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi perikanan (Ton)	1.052.510,18	9.780.000,00	10,76
	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	67,36	57,27	117,62
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	265	-	-

*) angka sementara

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2023:

1. Tidak ada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi nasional, sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional;
2. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTP Nasional lebih tinggi dari capaian NTP Sulawesi Tengah. Dimana capaian nasional sebesar 105,22 dan capaian Sulawesi Tengah 103,12. Akan tetapi meskipun capaian NTP Sulteng lebih rendah tetapi nilainya berada diatas angka 100. Hal ini berarti bahwa nelayan/pembudidaya mengalami surplus

- (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga);
3. Tahun 2023 indikator *rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial*, tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional;
 4. Tahun 2023 target produksi perikanan Sulawesi Tengah 0.97 juta ton atau sebesar 3,44% dari target nasional yakni 28,22 juta ton. Realisasi produksi perikanan Sulawesi Tengah 2023 sebesar 1,05 juta ton* atau sebesar 10,74% dari capaian target nasional yang mencapai 9,78 juta ton*. Hal ini berarti produksi perikanan Sulawesi Tengah berkontribusi 10,74% terhadap produksi perikanan nasional;
 5. Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Penguatan Daya Saing (DJPDS) menetapkan target nasional untuk indikator *angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)* sebesar 57,50 dan tercapai 57,27* sedangkan target DKP Sulteng sebesar 57,05 dan tercapai 67,34*. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target daerah maupun target nasional. Untuk skala nasional Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-10 (Sepuluh) capaian angka konsumsi ikan. Provinsi dengan capaian tertinggi secara berturut-turut adalah Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.
 6. Pengukuran indikator *jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)* tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

Sebagian besar target kinerja DKP Sulteng tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja DKP Sulteng, antara lain:

1. **Indeks Reformasi Birokrasi**, target untuk indikator ini adalah 64 dan tercapai 67,44 atau sebesar 105,38%. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari komitmen DKP untuk memberikan layanan birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat.
2. **Nilai Tukar Perikanan**, target untuk indikator ini adalah 100,8 dan terealisasi sebesar 103,12. Capaian ini melebihi target sebesar 102,30%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng dalam menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Sepanjang Tahun 2023 dilakukan peningkatan sarana-prasarana dan pendampingan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan akan dilakukan perbaikan terkait menurunnya Nilai Tukar Perikanan dibandingkan tahun 2022.

3. **Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**, Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan konservasi adalah luasnya kawasan perairan dan keterbatasan jumlah SDM yang mengelola kawasan konservasi. Solusi yang telah diupayakan oleh DKP Sulteng adalah dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah yang dianggap paling krusial merusak habitatnya.
4. **Produksi perikanan**, tahun 2023 target produksi perikanan sebesar 972.693,75 ton dan terealisasi sementara 1.052.510,18 ton* atau pencapaian sebesar 108,21. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan oleh DKP dalam menyikapi kebutuhan-kebutuhan/permasalahan-permasalahan nelayan dan pembudidaya dilapangan. Pemberian bantuan, pendampingan, serta peningkatan sarana prasarana perikanan adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh DKP dalam rangka pencapaian produksi perikanan.
5. **Angka Konsumsi Ikan**, tahun 2023 target angka konsumsi ikan adalah 57,05 Kg/kap/th dan terealisasi sebesar 67,36 Kg/Kap/Th* atau 118,07%. Setiap tahun DKP melaksanakan kampanye gemar makan ikan dan publisitas olahan produk perikanan kelautan. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian nilai angka konsumsi ikan ini.
6. **Hari operasi pengawasan SDKP**, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian hanya 106,00% atau sebanyak 265 hari dari target 250 hari.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Dalam pencapaian perjanjian kinerja, DKP Sulteng didukung oleh beberapa program dan anggaran. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Alokasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)
Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	32.158.211.959	30.002.758.768	93,30
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan (%)	45.567.580.753	42.780.397.713	93,88
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	6.151.465.999	4.615.299.345	75,03
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi perikanan (Ton)	50.619.238.467	47.707.866.899	94,25
	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	4.356.264.163	4.279.090.643	98,23
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis (SS) – 1 *indeks reformasi birokrasi*, DKP didukung anggaran Rp32.158.211.959,- dan terealisasi sebesar Rp30.002.758.768,- atau sebesar 93,30%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) - 2 *meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan*, DKP Sulteng maka didukung anggaran sebesar Rp45.567.580.753,- dan teralisasi Rp42.780.397.713,- atau sebesar 93,88%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) - 3 *terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan*, DKP Sulteng mendapat dukungan anggaran Rp6.151.465.999,- dan teralisasi Rp4.615.299.345,- atau sebesar 75,03%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) – 4 *peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing*, dukungan anggaran sebesar Rp54.975.502.630,- dan teralisasi Rp51.986.957.542,- atau sebesar 94,56%,

Dalam upaya mencapai sasaran strategis (SS) 5 *terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP*, DKP Sulteng didukung anggaran Rp5.123.330.350,- dan teralisasi Rp4.915.851.599,- atau sebesar 95,95%.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan DKP Sulteng, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (SS1)							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	67,44	105,38	32.158.211.959	30.002.758.768	93,30
	TOTAL SS1	64	67,44	105,38	32.158.211.959	30.002.758.768	93,30
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS2)							
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Perikanan (%)	100,8	103,12	102,30	45.567.580.753	42.780.397.713	93,88
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
	TOTAL SS2	100,8	103,12	102,30	45.567.580.753	42.780.397.713	93,88
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (SS3)							
Program pengelolaan Ruang Laut	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19,98	18,22	91,19	6.151.465.999	4.615.299.345	75,03
	TOTAL SS3	19,98	18,22	91,19	6.151.465.999	4.615.299.345	75,03
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing (SS4)							
Program Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan (Ton)	972.693,75	1.052.510,18	108,21	50.619.238.467	47.707.866.899	94,25
Program pengelolaan perikanan budidaya							
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	57,05	67,36	118,07	4.356.264.163	4.279.090.643	98,23
	TOTAL SS4	972.750,08	1.052.577,54	113,14	54.975.502.630	51.986.957.542	94,56
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP (SS5)							
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	250	265	106,00	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95
	TOTAL SS5	250	265	106,00	5.123.330.350	4.915.851.599	95,95

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat:

1. SS – 1 didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah dimana capaian keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 93,30% dan capaian kinerja 105,38%.

2. SS - 2 didukung oleh 2 (dua) program yakni program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan perikanan tangkap. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 102,30% dan capaian realisasi anggaran 93,88%.
3. SS - 3 didukung oleh program pengelolaan ruang laut. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 91,19% dan capaian realisasi anggaran 75,03%.
4. SS - 4 didukung oleh 3 (tiga) program yakni program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 113,14% dan capaian realisasi anggaran 94,56%.
- SS - 5 didukung oleh program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 106,00% dan capaian realisasi anggaran 95,95%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Salah satu tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat unit-unit kerja yang menangani langsung hubungan kepada masyarakat, yaitu: (1) Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mengurus masalah perizinan usaha perikanan; (2) UPT PMHP (Penerapan Mutu Hasil Perikanan), menangani sewa uji mutu hasil perikanan; (3) UPT Balai Perbenihan, melalui retribusi penjualan produk usaha daerah dengan menyediakan induk dan benih ikan dan udang serta ikan dan udang konsumsi; (4) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV, menangani masalah Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan.

Berikut prosedur operasional dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani pelayanan publik;

a. Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang PRL

Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang PRL menangani masalah perijinan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan berasal dari perizinan usaha perikanan dimana memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan), dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).

b. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah berupaya untuk membantu dalam pelaksanaan ekspor komoditi perikanan melalui sertifikasi mutu yang didasarkan pada hasil pengujian mutu dan pengawasan/monitoring

penerapan PMMT mulai dari budidaya, penangkapan ikan, pengolahan sampai siap ekspor.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan No. 9 tahun 1985 dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 31 tahun 2004, pemerintah melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan dari praktek-praktek yang bertentangan dengan bidang kesehatan dan hygiene. Berdasarkan Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 7 ayat 2, standarisasi nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan menerbitkan *Health Certificate* (HC) sudah menjadi kewenangan KKP melalui Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sesuai fungsinya sebagai pelayanan jasa dalam pengujian mutu hasil perikanan, dapat digambarkan prosesnya sebagai berikut :

1. UPT PMHP melakukan pengujian mutu terhadap sampel sesuai permintaan pelanggan meliputi:
 - a) Uji organoleptik
 - b) Uji Mikrobiologi
 - Analisis Lempeng Total (ALT)
 - *E.Coli*
 - *Salmonella*
 - c) Uji Kimia
 - *Cloramphenicol* (*disubkontrakkan*)

c. UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPTD Balai Perbenihan Perikanan di Sulawesi Tengah memiliki dua sub bagian yang menjadi prioritas, yaitu Perbenihan Ikan Air Tawar dan Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut. Perbenihan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, sertifikasi perbenihan Air Tawar dan penyajian serta bimbingan pemanfaatan teknologi anjuran bidang pembenihan air tawar. Dalam pelaksanaan Tupoksi perbenihan air tawar didukung oleh 9 unit perbenihan sebagai berikut: (1) BBIS Kalawara (2) BBI Tulo (3) BBI Maenusi (4) BBI Lauwa (5) BBI Wuasa (6) Kolam Langaleso (7) Kolam Pakuli (8) BBI Tonusu (9) BBI Bolapapu. Pada BBI dan Kolam tersebut dikembangkan komoditas-komoditas unggulan sebagai berikut :

- 1) Ikan Mas
- 2) Nila Gift
- 3) Ikan Lele Dumbo
- 4) Ikan Hias
- 5) Ikan Mas Konsumsi
- 6) Ikan Nila Konsumsi

Pada Perbenihan Air Payau dan Laut, Sulawesi Tengah didukung oleh ketersediaan benih udang yang berkualitas baik yang berasal dari UPR, BBIP dan HSRT. Untuk mengoptimalkan kegiatan usaha pada Unit-unit tersebut, perbenihan perikanan Air Payau dan laut mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, menyampaikan dan memberikan bimbingan pemanfaatan dengan teknologi anjuran di bidang pembenihan ikan air payau dan laut dimana berlokasi di : (1) BBAP Kampal (2) BBAP Tindaki dan (3) HSRT Mambo.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, UPTD Balai Perbenihan melayani pembelian benih ikan air tawar, benur udang dan ikan konsumsi dimana masyarakat dapat langsung melakukan transaksi di unit perbenihan bersangkutan. Output dari pembelian benih, benur dan ikan konsumsi itu akan menjadi sumber PAD yang dihasilkan oleh UPTD Balai Perbenihan Perikanan bagi Sulawesi Tengah.

d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I,II,III, dan IV

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan untuk sektor bidang perikanan tangkap yang bergerak pada obyek pelayanan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah mengelola unit Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di beberapa Kabupaten sebagai tempat operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sulawesi Tengah. PPI yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 6 (enam) lokasi, yaitu: PP Donggala dan PP Ogotua yang berada pada Wilayah I, PPI Paranggi yang berada di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, PPI Pagimana dan PPI Mato berada di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III dan PPI Kolonodale berada di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV. Ke-6 PPI merupakan tempat pemasaran hasil perikanan oleh nelayan dan pedagang ikan. Guna mendukung aktivitas pada PPI-PPI tersebut diperlukan kapal-kapal yang layak operasional sehingga UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Pengujian Kapal, pelayanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) dan SPB (Surat Perintah Berlayar), dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian kapal
2. Petugas memeriksa dokumen kapal
3. Petugas memeriksa kondisi kapal yaitu bagian mesin dan body kapal untuk melihat kesesuaiannya dengan dokumen
4. Jika kondisi kapal laik untuk berlayar maka akan diterbitkan sertifikat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2016 – 2021 memberikan dampak positif dan manfaat, akan tetapi tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi.

Berdasarkan tugas dan fungsi, dalam pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

Tabel 10. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang relatif masih rendah	• Nilai Tukar Nelayan yang cenderung menurun setiap tahunnya • Nilai Tukar Pembudidaya yang masih berfluktuatif dengan rata-rata capaian pertahunnya 89,48%	• Kualitas SDM yang belum merata • Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
2	Masih rendahnya produksi dan produktifitas perikanan	Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88	• Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata • Masih kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi teknis • Belum optimalnya sarana prasarana pendukung produksi perikanan • Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana • Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas • Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi • Keterbatasan BBM bersubsidi dan es • Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik • Infrastruktur kepelabuhanan yang belum mendukung • Konflik kepentingan dengan pengguna lain • Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
3	Rendahnya daya saing produk perikanan	• Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun • Masih terbatasnya akses permodalan • Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% • Belum optimalnya sistem logistik	• SDM aparatur dan pelaku usaha yang belum merata • Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha • Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional • Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan • Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
4	Pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif dan efisien	• Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% • Peraturan yang sering berubah dan tumpang tindih	• jumlah PPNS dan pengawas SDKP terbatas • Masih maraknya IUU Fishing • Sistem perijinan belum efektif dan efisien • Mahalnya biaya operasi pengawasan • Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum

5	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal	• Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% • Masih banyaknya regulasi pengelolaan ruang laut yang tumpang tindih dan belum optimal • Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan • Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas • Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang) • Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang • Ketersediaan dokumen review RZWP3K
6	Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	• Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten • Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP • Keterbatasan sarana prasarana aparaturnya terutama pada unit-unit pelaksana teknis

Dari identifikasi pada tabel diatas dirangkum akar-akar permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Pelaku usaha yang relatif rendah
2. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal
3. Belum optimalnya sarana prasarana serta infrastruktur pendukung produksi
4. Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana
5. Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik
6. Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas
7. Keterbatasan BBM bersubsidi dan es
8. Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
9. Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain
11. Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
12. Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha
13. Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional
14. Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan
15. Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
16. Masih maraknya IUU Fishing
17. Sistem perijinan belum efektif dan efisien
18. Mahalnya biaya operasi pengawasan
19. Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum
20. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan
21. Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas
22. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang)

23. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang
24. Ketersediaan dokumen review RZWP3K
25. Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko
26. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP
27. Keterbatasan sarana prasarana aparatur terutama pada unit-unit pelaksana teknis

2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, ditetapkan dengan rumusan:

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Tengah: adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 September 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Sebagai penjabaran **Visi** RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

Misi 1: *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.* Misi ini dimaksudkan untuk

Misi 2: *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.*

Misi 3: *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.*

Misi 4: *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*

Misi 5: *Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.*

Misi 6: *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.*

Misi 7: *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.*

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	a) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten b) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP c) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko d) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada unit-unit pelaksana teknis	a) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum; b) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015 c) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan d) Teknologi informasi yang semakin mudah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	a. Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88 b. Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun c. Masih terbatasnya akses permodalan d. Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% e. Belum optimalnya sistem logistik perikanan	a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional b) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal c) Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata d) Keterbatasan akses pakan, benih, es serta BBM bersubsidi menyebabkan biaya produksi yang besar e) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien f) Ketersediaan data dan informasi yang belum terintegrasi g) Pemahaman mengenai system jaminan mutu yang masih kurang h) Mayoritas pelaku usaha masih menggunakan teknologi tradisional i) Mayoritas usaha yang dijalankan masih memiliki resiko tinggi j) Kelembagaan pelaku usaha yang belum optimal k) Masih maraknya konflik kepentingan antar pengguna	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan untuk kemajuan sektor kelautan dan pemerintah b) Terbangunnya kesadaran aparaturnya akan pentingnya pelayanan c) Adanya keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya d) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar e) Ketersediaan teknologi pakan ikan f) Penataan wilayah sistem logistik ikan g) Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi h) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan	a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% b. Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% c. Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan belum optimal d. Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	a. Sarana prasarana pengawasan serta pengelolaan ruang laut yang ada masih terbatas b. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan pengelola ruang laut yang relatif rendah c. Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien d. Mahalnya biaya operasi pengawas e. Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i> f. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang	i) Komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan SDKP j) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut k) Adanya Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu l) Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi m) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak n) telah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Dari 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 1 Misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yakni:

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L

Telaahan terhadap Renstra K/L dan SDKP Provinsi perlu dilakukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sarana Renstra OPD.

Tabel 12. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDB Perikanan (%)	Kualitas SDM Aparatur yang masih relatif rendah	e) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten	e) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum;
2	Produksi perikanan (ton)		f) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP	f) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015
3	a) Perikanan tangkap		g) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko	g) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan
4	b) Perikanan budidaya		h) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada unit-unit pelaksana teknis	h) Teknologi informasi yang semakin mudah
5	Produksi garam rakyat (juta ton)			
6	NTN/NTPi (%)			
7	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)			
8	Konsumsi ikan (kg/kap/th)			
9	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola (pulau)	- Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil - Sistem pendataan dan akses informasi yang belum optimal	a) Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan
10	Luas kawasan konservasi perairan (ha)		b) Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat	b) Kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang memadai untuk diberdayakan
	Wilayah perairan bebas IUU fishing (%)		c) Pemahaman tentang pentingnya data yang masih kurang	
	Jumlah kasus penolakan ekspor per Negara mitra (kasus)		d) Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola data informasi yang relatif masih lemah	
	Jumlah hasil litbang yang inovatif (hasil litbang)		e) Keterbatasan sarana prasarana pengolah informasi dan data kelautan dan perikanan	
	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih dan disuluh yang kompeten di bidang KP (%)	- Kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan yang masih relatif rendah - Belum optimalnya kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan - Masih kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	a) Rendahnya tingkat pendidikan SDM pelaku usaha perikanan	a) Keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup
			b) Kemampuan kapasitas kelembagaan pelaku usaha masih terbatas	b) Adanya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha yang dilakukan oleh OPD
			c) Masih kurangnya kepercayaan dunia perbankan pada sektor perikanan	c) Mulai banyaknya inovasi teknologi yang dilakukan
			d) Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pelaku usaha perikanan skala kecil	
			e) Tingkat suku bunga	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kredit yang masih relatif tinggi	bidang kelautan perikanan yang melibatkan perbankan
		• Belum optimalnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan • Masih sederhananya teknologi yang diterapkan • Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas • Rendahnya daya saing produk perikanan • Belum optimalnya pemanfaatan pasar di dalam dan luar negeri • Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan • Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain • Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan • Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien • Belum optimalnya peran masyarakat dalam mengelola kawasan perairan	a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional b) Kualitas SDM Kelautan Perikanan yang relatif rendah c) Sebagian besar pakan masih didatangkan dari luar negeri d) Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas e) Mahalnya pakan mengakibatkan ongkos produksi yang besar f) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien g) Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien h) Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut i) Mahalnya biaya operasi pengawas j) Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan b) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar c) Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan d) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut e) Penataan wilayah sistem logistik ikan f) Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah g) pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan h) Rekonstruktisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi i) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak j) Telah tersusunnya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) k) Penguatan regulasi dan kebijakan

2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka RTRW Provinsi adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir dan pemanfaatan ruang kota pantai sebagai amanah yang tercantum dalam pasal 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, dimana RTRW Provinsi juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Provinsi.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan pengutamaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu dimaksudkan pula untuk memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan RTRW Provinsi dilakukan dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, dalam penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pula pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi antara lain untuk mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis Mitigasi Bencana, yang diterjemahkan dalam

kebijakan dan strategi pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Adapun rencana pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, dalam penyusunan RTRW Provinsi juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun, termasuk KKPRL yang menjadi pengaturan di perairan pesisir; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 telah memiliki Dokumen RTRW baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Tentang RTRWP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Pengelolaan wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 34 isu, maka dapat ditarik beberapa isu menjadi 23 isu prioritas yang diprioritaskan penanganannya, yakni: 1) Mengendalikan laju degradasi ekosistem 2) Meningkatkan diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil 3) Mencegah dan menanggulangi erosi/abrasi pantai 4) Mengendalikan upaya pencegahan Illegal Fishing 5) Meminimalisir kerusakan hutan yang berdampak pada perubahan lingkungan pesisir 6) Meningkatkan kelestarian habitat dan ekosistem WP-3-K 7) Mengendalikan dan mengelola pencemaran lingkungan di WP-3-K 8) Membentuk, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan konservasi di WP-3-K 9) Mewujudkan pantai bebas pencemaran oleh sampah 10) Melindungi masyarakat, Infrastruktur dan segenap aset yang ada di wilayah pesisir dari bahaya/dampak bencana dan perubahan iklim 11) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat WP-3-K 12) Mengoptimalkan potensi perikanan yang ramah lingkungan di WP-3-K 13) Meningkatkan usaha-usaha perikanan guna meningkatkan SDM 14) Meningkatkan penerapan kearifan lokal dan peran lembaga tradisional/adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 15) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola WP-3-K 16) Meningkatkan kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil 17) Meningkatkan peran armada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 18) Meningkatkan dukungan transportasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 19) Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi laut pulau-pulau kecil 20) Meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu 21) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana wisata WP-3-K 22) Penataan dan penegakan aturan reklamasi 23) Menanganan dampak perubahan garis pantai dan mitigasi bencana Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, kebijakan pembangunan daerah dan

nasional serta mempertimbangkan kecenderungan kondisi global, lokal dan regional telah dirumuskan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini telah pula memperhatikan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Tengah.

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah “Terwujudnya Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Bersih, Indah, Produktif, Berdayaguna, Aman, Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Visi tersebut diatas mengandung pengertian sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Bersih 3. Indah 4. Produktif mengandung pengertian bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, wisata serta jasa-jasa lingkungan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. 5. Berdayaguna 6. Aman 7. Berkelanjutan

Misi rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Tengah meliputi: a. Ekologi 1. Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Menata pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Meningkatkan dan memelihara kualitas serta daya dukung lingkungan hidup; dan 4. Meningkatkan upaya mitigasi bencana. b. Ekonomi 1. Mengembangkan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Meningkatkan peran sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 7. Meningkatkan lapangan kerja c. Sosial Budaya 1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Melestarikan nilai-nilai budaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan d. Kelembagaan 1. Meningkatkan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Penguatan kelembagaan antar sector terkait dalam usaha pelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu.

Tabel 13. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	meningkatkan fungsi sistem perlindungan dan pengamanan pantai dari erosi/abrasi	a. pengkajian dan pemetaan potensi daerah rawan abrasi dan sedimentasi; b. pemanfaatan perlindungan alamiah berupa mangrove dan/atau buatan dengan menambah bangunan pelindung pantai seperti bronjong/<i>groin</i>, <i>breakwater</i> untuk memperkuat pantai; c. peningkatan pemeliharaan pantai dan mengendalikan faktor- faktor yang dapat merusak sistem perlindungan pantai, terutama faktor- faktor yang berasal dari perbuatan manusia; d. pensosialisasian pengelolaan yang baik untuk pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan mematuhi daerah sempadan pantai; e. penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS; f. peningkatan keamanan pantai secara buatan/struktural; g. Pensosialisasian kawasan perlindungan pantai dan sungai di mana untuk pantai sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan sungai selebar 50 m.
	memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem, melalui pengembangan pengelolaan KKP3K, KKPD, KKM dan kawasan konservasi lainnya b. peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, melalui penyelenggaraan RHL serta pengelolaan DAS; c. pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK; dan d. pengembangan perlindungan biota laut langka
3	mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan WP-3-K; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan AMDAL di setiap unit industri di WP-3-K.

4	menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan b. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional.
5	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi WP-3-K	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; b. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional; c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai; d. peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi; e. peningkatan pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan pentingnya penyelamatan SDA ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; peningkatan sistem informasi terkait dengan aturan dan keberadaan Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; pembangunan rencana kelola bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembangunan koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar pemangku kepentingan.
6	melindungi kawasan konservasi WP-3-K, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan b. pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara berkelanjutan.
7	meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim	a. peningkatan Komunikasi-Informasi-Edukasi mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim dengan ditunjang oleh bahan-bahan komunikasi yang dibutuhkan; b. peningkatan kampanye mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim melalui pendidikan formal; dan c. pengintensifan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang <u>penanggulangan bencana dan dampak</u>

8	mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap; b. pembinaan secara intensif melalui diseminasi dan penyediaan unit-unit percontohan perikanan budidaya yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat dengan sistem pendampingan; c. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; d. peningkatan manajemen dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan e. peningkatan manajemen dan koordinasi kawasan minapolitan.
9	mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif secara terpadu	peningkatan produktivitas dan daya saing
10	mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pesisir	a. peningkatan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan pesisir melalui pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat; dan b. penggalangan kemitraan usaha antara korporasi dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari.
11	mengembangkan aneka produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan	a. pengembangan pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan; dan b. penggalangan kemitraan usaha antara swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari.
12	meningkatkan stok atau sediaan sumberdaya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir	a. pengkajian stok (stock assessment) sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; b. pengevaluasian perijinan, tingkat pemanfaatan, pelaksanaan aturan jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan; dan c. pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove

13	mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. pengembangan kawasan minapolitan budidaya/tangkap melalui pengintegrasian sentra-sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah; b. pengembangan usaha budidaya perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan c. peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
14	meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya	pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut.
15	meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke pulau-pulau kecil	a. peningkatan jumlah angkutan laut; dan b. pembinaan usaha jasa pelayaran rakyat
16	meningkatkan sarana dan prasarana wisata bahari	a. pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari yang berbasis masyarakat melalui kemitraan; dan b. peningkatan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan pemangku kepentingan secara terkoordinasi.
17	mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal	a. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan; b. pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari; c. pengsinergian pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran di kabupaten dan kota; d. pembangunan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang di dukung swasta; dan e. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan.
18	mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir	pengembangan dan peningkatan program pelestarian ekosistem berbasis masyarakat

19	mewujudkan pantai lestari, indah, dan bebas sampah	a. penggalangan kerja sama regional dan kerja sama antara Kabupaten di wilayah pesisir dalam upaya mengurangi beban masuknya sampah ke perairan Sulawesi Tengah; b. penggalangan aksi-aksi kebersihan pantai secara rutin melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut; c. peningkatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam gerakan kebersihan pantai; dan d. pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah.
20	meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana	a. pengidentifikasian dan merencanakan tempat dan jalur evakuasi; b. pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada untuk tempat evakuasi; c. pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas baru untuk mitigasi dan adaptasi bencana; d. peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e. pengembangan sadar bencana
21	menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di wilayah WP-3-K	a. peningkatan kapasitas SDM masyarakat WP-3-K; b. pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif di kalangan masyarakat WP-3-K; c. pensinergian program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K lintas sektor dan antar level pemerintahan; dan penggalangan kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K.
22	meningkatkan penerapan kearifan lokal berdasarkan tradisi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. pengkajian nilai-nilai kearifan lokal berbasis tradisi lokal dan pembinaan dalam penerapannya melalui lembaga-lembaga tradisional/adat; dan b. pengembangan dan pengintegrasian aturan-aturan/nilai-nilai/tradisi dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

23	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan sistem insentif bagi organisasi dan lembaga lokal yang berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K; b. pelibatan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. pelibatan pemangku kepentingan dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.
24	mengurangi konflik masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan mata pencaharian alternatif; b. pengembangan solidaritas dan aksi kolektif; c. pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan d. pembangunan koordinasi antar instansi dan koordinasi antar kabupaten/ kota.
25	meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan keterjangkauan/aksesibilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan b. perubahan paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan.
26	meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA unggulan di bidang kelautan dan/atau SMK kelautan; dan b. pengintegrasian dan mengimplementasikan materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam kurikulum muatan lokal pada sekolah tingkat menengah atau sederajat.
27	meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP-3-K	a. pemberdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan; b. pengembangan usaha budidaya air payau dan air laut di WP-3-K; c. pengembangan produksi pangan di pulau-pulau kecil; d. pengembangan pengolahan dan konsumsi pangan alternatif; e. peningkatan akses pangan masyarakat; f. peningkatan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan dan ekonomi; dan g. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal.

28	meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah	a. penguatan komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan DPRD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana melalui pembentukan lembaga khusus Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat peraturan perundangan; b. penguatan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional; c. monitoring dan evaluasi kecakapan lembaga dalam melakukan mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim; d. Penguatan kemampuan institusi untuk implementasi kebijakan penanganan bencana dan dampak perubahan iklim; e. penguatan komitmen, kesepahaman dan kerja sama yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab institusi di luar lingkungan Pemda dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim; f. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana serta melengkapi dan menyempurnakan SOP yang telah ada; g. penyusunan peraturan daerah yang diperlukan untuk menunjang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif;
29	meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga lokal dalam pengelolaan WP-3-K; dan b. pengembangan aspek pasar dan peningkatan nilai tambah produk.
30	meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	a. pendataan dan pemetaan yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b. pembinaan manajemen organisasi; dan c. penyediaan fasilitas/ sarana/prasarana c. Penyediaan fasilitas/ sarana/ prasarana

31	menyediakan peraturan perundang-undangan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku	- pengkajian akademik penataan hukum pengelolaan WP-3-K di daerah; - penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub mengenai pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penjabaran dari peraturan perundangan; - pembangunan komitmen DPRD untuk mengakomodasi proses legislasi pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan WP-3-K; dan - pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pembuatan produk hukum.
----	---	--

Sumber : RSWP-3K Sulteng

2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

a) Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	RTRW terkait Tugas & Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dislutkan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya Provinsi (Kawasan Andalan (Kadal) dan Kawasan Strategis Provinsi)	- Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di wilayah pesisir dan PPK - Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait pengendalian pemanfaatan SDKL - Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain - Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas - Pengakuan hukum yang masih belum efektif dan efisien	- Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam - Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat - Keterbatasan sarana prasarana pengolah informasi dan data kelautan dan perikanan - Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien - Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut - Mahalnya biaya operasi pengawas - Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>	- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar - Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut - Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan - Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah - Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan - Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi - Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak - Telah tersusunnya Perda RZWP3K - Penguatan regulasi dan kebijakan

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan dinas, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah pada renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Tabel 15. Identifikasi Isu Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Isu lingkungan	- Degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil - Masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove - Pencemaran wilayah pesisir yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan	- Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal - Kualitas SDM - Koordinasi antar instansi belum optimal - Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas	
2	Isu Illegal fishing	- Penurunan stok ikan <i>Overfishing</i> akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat	- Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas - Konflik kepentingan dengan pengguna lain - Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien	
3	Isu ketahanan pangan	- Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya ikan merugi - Masih rendahnya minat pelau usaha budidaya untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan <i>food safety</i> dan jaminan mutu - Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya - Angka kemiskinan masih relatif tinggi, terutama di kalangan nelayan di wilayah pesisir	- Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya - Inovasi teknologi pada usaha perikanan - Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas - Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan - Terbatasnya sarana prasarana produksi - Belum optimalnya peran dan fungsi Sentra-sentra perikanan - Konflik kepentingan antar pengguna misalnya nelayan yang masih marak terkait pemanfaatan pengelolaan ruang laut	
4	Persaingan pasar global dan industrialisasi	- Rendahnya daya saing produk perikanan kelautan - Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah	- Keterbatasan infrastruktur dasar - Terbatasnya akses permodalan - Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien	

Melalui penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, maka dilakukan penentuan isu-isu strategis, yakni:

1. Kualitas SDM kelautan dan perikanan baik aparatur maupun pelaku usaha;
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengawasan dan penegakan hukum.

2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran, pada tahun anggaran 2025 ditetapkan beberapa beberapa usulan program dan kegiatan yang terangkum dalam anggaran APBN dan APBD, sebagai berikut:

A. Program APBN Tahun 2025

Pada APBN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 program besar sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Keuangan KKP, (2) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP, (3) Pengelolaan Data Statistik dan Informasi
2. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengendalian Penangkapan Ikan, (3) Pengelolaan Kenelayanan, (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), (5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
3. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dengan kegiatan: (1) Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, (2) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, (3) Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, (4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, (5) Pengelolaan Pakan Ikan.
4. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan, (3) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, (4) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen DJPDSPKP.
5. Program pengelolaan ruang laut dengan kegiatan : (1) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, (2) Perencanaan Ruang Laut, (3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PRL.
6. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Operasional Kapal Pengawas, (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, (3) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup:

- a) Penambahan luas kawasan konservasi laut dengan Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂;

- b) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan
- c) Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan dengan Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan;
- d) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- e) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dengan Menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

Menu dan rincian Kegiatan DAK Provinsi 2025 yang akan diusulkan meliputi:

- 1) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), berupa: (1) Penahan Gelombang (breakwater) (2) Turap Penahan Tanah (revetment) (3) Dermaga (4) Kolam Pelabuhan (5) Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan (6) Tempat Pemasaran Ikan (7) Fasilitas Air (Tawar) Bersih (8) Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) (9) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (10) Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur serta (11) Rehabilitasi Pabrik Es/Cold Storgae
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), berupa (1) Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (2) Pembangunan Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (3) Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (4) Pembangunan Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (5) Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi (6) Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk (7) Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan (8) Penyediaan Sumber Air
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, dan
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2025, terdapat beberapa program yang diusulkan oleh Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan(UPTD Provinsi), yang difokuskan pada PPI Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, PPI Mato, Banggai Laut dan PPI Laleu, Kabupaten Morowali;
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) pada BBI Kalawara, BBI Tulo dan BBI Tonusu;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi – Provinsi pada 4 KKPD dan lokasi prioritas pengawasan.

B. Program APBD Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan susunan Program/ Kegiatan untuk dana yang bersumber dari APBD dimana sebelumnya terdiri dari 6 (enam) program dan 27 kegiatan menjadi sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, meliputi (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2) Administrasi Keuangan (3) Administrasi Umum (4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, meliputi (1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; (4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; (5) Pencadangan kawasan konservasi; (6) Pelibatan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut; (7) Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan; (8) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; (9) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (10) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; (11) Pencadangan kawasan konservasi; (12) Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut; (13) Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan.
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, meliputi (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (4) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (5) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (6) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (7) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (8) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan

Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (9) Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (10) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (11) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (12) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (13) Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (14) Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (15) Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; (16) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan; (17) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (18) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (19) Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (20) Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (21) Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; (22) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan.

- 4) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, meliputi (1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau

- Tenaga Kerja Asing (3) Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (4) Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (6) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
- 5) PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, meliputi : (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (3) Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (4) Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, meliputi : (1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (4) Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (5) Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (6) Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar; (7) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan; (8) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan Pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar; (9) Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar (10) Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (11) Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri; (12) Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar; (13) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan; (14) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar; (15) Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar;

Keenam program ini didorong dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan dimana ditargetkan sebesar 4% pada 2024 dan akan mencapai 8% diakhir periode Renstra dari 26.927 KK dari Jumlah Nelayan ± 89.026 orang di Sulteng sesuai data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan peningkatan produktifitas komoditas perikanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Terhadap RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan bagi setiap daerah dalam pengembangan sektor ini adalah:

Pengelolaan sumberdaya ekonomi

1. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan SDM, riset kemaritiman dan kelautan serta perbaikan sistem database kelautan dan perikanan; (6) menyusun pedoman penyelerasan RZWP3K dan RTRW Provinsi.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen di 11 WPP, dan pengembangan sentra-sentra produksi perikanan yang berdaya saing. Pengembangan komoditas utama perikanan dan kelautan mencakup komoditas udang, tuna, rumput laut, rajungan dan ikan nila serta garam akan dilakukan di provinsi-provinsi yang memiliki keunggulan kompetitif wilayah di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Maluku dan Papua.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital; (4) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; (5) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (6) meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN; (7) meningkatkan industri halal dan produk sehat.

3.1.2 Sinergitas RPJMN, RKP 2024 , Renstra KKP RI dalam mendukung Program Nasional

Tujuh agenda pembangunan RPJMN adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024: Pembangunan yang Berkualitas yaitu dengan Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi dimana kesemuanya itu diukur melalui tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia serta penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) menuju target 29% ditahun 2030 (*Paris Agreement*).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- 2) Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- 3) Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan

- 4) Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

Dukungan Pemerintah Daerah yang diharapkan terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan

- 1) Penyelesaian Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan Dokumen RTRWP;
- 2) Pembinaan dan pendampingan UMKM Sektor Kelautan & Perikanan untuk peningkatan skala usaha;
- 3) Penguatan Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat melalui peningkatan dan perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dalam rangka penanganan *Stunting*;
- 4) Dukungan penyediaan lahan yang *clear* dan *clean* dalam mendukung kegiatan prioritas KKP (pelabuhan perikanan, *cold storage*, pasar dll);
- 5) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendukung masuknya investasi sektor kelautan dan perikanan;
- 6) Fasilitasi pelaku utama KP dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
- 7) Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) terkait kelautan dan perikanan dalam RPJMD untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 8) Penguatan sistem data statistik kelautan dan perikanan di daerah dengan satu data KKP.

Arah dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan didalam mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bila merunut arah dan kebijakan nasional diatas, fokus pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah pemasar perikanan dan masyarakat pesisir lainnya
2. Peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan per kapita serta ekspor hasil perikanan
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
4. Pengembangan teknologi informasi dan IPTEK untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah
5. Peningkatan mutu produk hasil perikanan dan pengurangan losses
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan POKMASWAS; pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya termasuk TNI-AL, Bea cukai, Perhubungan, Perdagangan, dll; sosialisasi aturan dan pentingnya pengawasan; fasilitasi pengembangan PERDES
7. Penguatan Legislasi dan Regulasi
8. Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Pengelolaan Lingkungan
9. Mitigasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja adalah untuk memfokuskan arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya agar terjadi sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah: Sesuai IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah;

Tabel 16. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2025
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	102,5
Meningkatnya perekonomian kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	60,53
Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	21.85
peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (ton)	1.569.932
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	350
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik	Capaian SAKIP	81

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 serta RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang. Pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna Tongkol Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Berikut Rencana Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah:

A. Pengembangan Rumput Laut

Potensi areal budidaya rumput laut sebesar 540.012 Ha, sedang lahan tambak sebesar 42.095 Ha. Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Guna mendukung pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah, pada tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kerjasama dengan SEOMEIO BIOTROP dalam melakukan

pengembangan Rumput Laut Teknologi Kultur Jaringan di Sulawesi Tengah dimana permasalahan rumput laut di Sulawesi Tengah yaitu (1) Tingginya fluktuasi harga sehingga belum menjadi usaha pokok; (2) Rendahnya produktifitas dan mutu rumput laut, karena masih menggantungkan bibit yang diperoleh secara vegetatif dari kawasan budidaya sekitarnya; (3) Jumlah kebun bibit yang terbatas; (4) Belum diproduksi dengan cara modern melalui kebun bibit yang asal induknya hasil kultur jaringan; (5) Penyediaan bibit dipengaruhi musim; dan (6) Perbanyakan bibit secara vegetatif terus menerus menyebabkan pertumbuhan lambat, mudah terkena penyakit serta kandungan karaginan rendah. Metode ini dipilih karena dapat memproduksi bibit rumput laut dalam skala besar. Tidak dipengaruhi musim karena dilakukan di laboratorium, bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang identik dengan induknya, tidak memerlukan tempat yang luas dan kesehatan dan mutu bibit yang dihasilkan lebih terjamin.

B. Pengembangan Tuna, Tongkol dan Cakalang dan Pelagis Kecil

Industrialisasi Tuna, Tongkol, Cakalang dan Pelagis Kecil Dilakukan dalam mendukung peningkatan devisa dan ketahanan pangan nasional, dilakukan melalui perkuatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Produksi Tuna, Tongkol dan Cakalang tahun 2021 sebesar 45.892,75 ton; sedangkan pelagis kecil = 66.904,75 ton. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM pelaku usaha penguasaan IPTEK; (2) penataan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pangkalan pendaratan ikan (PPI); (3) rencana pengembangan karamba tuna; (4) pengembangan kawasan minapolitan tangkap pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Outer Ring Fishing Port Ogotua; (5) pemberdayaan nelayan skala 3-10 GT untuk Tuna/Cakalang; (6) restrukturisasi armada secara bertahap hingga 15-20 GT dan >30 GT; (7) pengembangan industri pengolahan (*processing and canning*) berbasis *zero waste*; (8) pengembangan industri penunjang (kapal fiberglass; dan alat tangkap ikan).

C. Pengembangan Udang

Potensi lahan tambak berkisar 54.812 Ha; namun pemanfaatannya baru sekitar 28,32%. Produksi udang tahun 2021 sebanyak 50.485,02 ton, didominasi Udang Windu (*P. Monodon*) dari tambak rakyat. Kawasan pertambakan di Sulawesi Tengah mempunyai ciri khas: (a) tidak berada dalam satu kawasan luas; namun berkisar 100-200 Ha; (b) jarak antar kawasan relatif jauh, berkisar 3-5 km; (c) sumberdaya air yang masih alami. Kondisi ini sangat ideal untuk pertambakan supra intensif; mengingat kecilnya potensi penyebaran penyakit secara horisontal. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM dan penguasaan IPTEK pelaku usaha; (2) pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan; (3) pengembangan tambak rakyat dengan komoditas Udang Windu, serta polikultur dengan bandeng dan *Gracilaria sp* melalui; (a) penguatan BBU dan produksi benih unggul; (b) revitalisasi konstruksi dan saluran tambak, (c) stimulan permodalan kerja, (d) pendampingan teknis budidaya; dan (4) Pengembangan Tambak Supra Intensif dengan komoditas Udang Vaname (*L. Vannamei*) melalui: (a) penggunaa teknologi yang efisien ramah lingkungan dan (b) tax holiday bagi pengembangan investasi.

D. Pengembangan Ikan Demersal

Produksi Ikan Demersal didominasi oleh *Red Snapper*, *Baramundi*, *Grouper*, *Giant Seaperch*, *Yellowtail Fusilier*, *Black and Silver Pomfret* dan *Goat-Fist*. Produksi tahun 2021 sebesar 52.312,30 ton. Pasar Ikan Dermasal, terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (*Processing Plant*) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah kabupaten Banggai. Pengembangan Ikan Demersal akan diintegrasikan dengan *Sea Ranching* berbasis Rumah Ikan (*Fish Home*). *Fish Home* adalah terumbu karang buatan (*artificial reef*), berfungsi sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut. Tujuan pembangunan *Fish Home* sebagai upaya konservasi, produksi; dan secara tidak langsung menjaga ketersediaan *food chain* bagi Tuna dan pelagis besar. *Sea Ranching* merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Strategi Industrialisasi sebagai berikut; (1) Peningkatan SDM untuk penguasaan IPTEK, (2) Penyiapan ekosistem berupa pembangunan *Fish Home*, (3) penyiapan kelembagaan masyarakat; (4) restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan *Fish Home*; (5) penyiapan aturan main pengolahan kawasan dan (6) peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola *Fish Home*.

E. Pengembangan Ikan Air Tawar

Pengembangan ikan air tawar lebih diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi ikan. Produksi tahun 2022 sebesar 1.918,249 ton. Strategi Industrialisasi sebagai berikut: (1) Pengembangan BBI dan Sentral Budidaya Ikan Air Tawar pada kolam, tambak marginal, Perairan Umum Daratan serta disekitar kawasan perkebunan dan pertambangan, fokus pada ikan mas, dan nila; (2) kerjasama pengembangan Budidaya Ikan Hemat Air di pekarangan rumah antara lain dengan penggunaan bioflok; melibatkan ORMAS, antara lain Organisasi Wanita, Pemuda dan Persatuan Wredatama, fokus pada ikan lele, nila, dan mas; (3) Kampanye GEMARIKAN dan diversifikasi produk perikanan.

3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2024 dan Rencana 2025

Tabel 17. Pendanaan Program dan Kegiatan 2024 dan Rencana 2025

PROGRAM/KEGIATAN			
SESUAI KEPMENDAGRI NO 050-5889 TAHUN 2020		2024	2025
SEKRETARIAT		22.665.673.661	43.992.056.339
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.992.056.339
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	953.000.000	1.794.477.838
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.566.366.312	18.802.193.373
	b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.000.000	1.997.929.328
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.307.349	300.924.000
	e. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		450.000.000
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.000.000	1.973.935.200
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.000.000	2.157.481.405
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA & P2HP		7.309.000.000	4.646.000.211
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.109.040.000	4.646.000.211
	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		35.000.000
	b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		35.000.000
	c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.212.040.000	2.576.000.211
	d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	4.897.000.000	2.000.000.000
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.199.960.000	2.225.400.094
	a. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	310.000.000	159.001.387
	b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	570.760.000	538.399.169
	c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	319.200.000	1.527.999.537
BIDANG PERIKANAN TANGKAP		22.517.652.651	27.473.444.639
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	22.517.652.651	27.473.444.639
	a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.920.651.765	19.899.885.474
	b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80.000.000	328.910.033
	c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap		

	Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	80.000.000	149.333.509
	d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.437.000.886	7.095.315.624
	BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT	4.700.000.000	3.995.554.832
5	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
	a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4.085.000.000	2.363.8003.000
	b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	445.000.000	290.000.000
	c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	170.000.000	1.341.751.8322
	BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.761.000.000	6.719.889.695
6	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3.761.000.000	6.719.889.695
	a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.658.000.000	6.599.889.695
	b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	103.000.000	120.000.000
	UPT. PMHP	1.100.000.000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.500.000	
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.100.000	500.688.000
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.900.000	166.008.021
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.500.000	526.297.770
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.000.000	
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	398.500.000	
	a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	398.500.000	
	b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	2.990.926.000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.326.000	
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.720.000	1.169.640.000
	b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		157.073.400
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000	192.960.629
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.286.606.000	1.793.015.000
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.555.600.000	
	a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
	b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.555.600.000	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I	2.792.000.000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.552.000.000	

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	242.656.757	776.682.000
b. Administrasi Kepegawaian	62.139.168	93.208.752
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.091.200	232.636.800
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.042.600.000	2.423.261.000
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.512.875	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	240.000.000	
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	180.000.000	
b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	60.000.000	
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II	1.197.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.864.000	406.296.000
b. Administrasi Kepegawaian	78.125.848	192.188.772
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.144.550	45.216.825
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	450.000.000
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.955.000	576.362.500
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.910.602	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	380.000.000	
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	155.000.000	
b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	225.000.000	
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III	1.627.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.358.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.000.000	450.353.790
b. Administrasi Kepegawaian		
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.060.400	87.803.100
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.000.000	207.530.500
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.736.300	1.212.706.682
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.203.300	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	269.000.000	
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	130.000.000	
b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	139.000.000	
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV	1.100.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.000.000	284.749.200
b. Administrasi Kepegawaian		
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	132.027.725
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	392.954.562	510.538.000

Pemerintahan Daerah		
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.045.438	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	410.000.000	
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	190.000.000	
b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	220.000.000	
UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI	350.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	50.000.000
b. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	12.000.000	30.000.000
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.000.000	150.000.000
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.580.000	116.522.000
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.420.00	
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	155.000.000	239.049.250
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	75.000.000	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80.000.000	
UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO	350.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.000.000	50.000.000
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.000.000	150.000.000
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	30.000.000
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.580.000	116.522.000
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.420.000	
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	155.000.000	149.049.250
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	75.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80.000.000	
UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI	350.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.000.000	50.000.000
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	30.000.000
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.000.000	150.000.000
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.580.000	116.522.000
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.420.000	

Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	155.000.000	239.049.250
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	75.000.000	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	80.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali	350.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.000.000	50.000.000
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	30.000.000
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.000.000	150.000.000
c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.580.000	116.522.000
d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.240.000	
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	155.000.000	239.049.250
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	75.000.000	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	80.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
JUMLAH	73.160.252.312	

3.5 FOKUS UTAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, terdapat perubahan struktur UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana awalnya berjumlah 10 UPTD menjadi 9 (sembilan) UPTD, sebagai berikut :

1. UPTD Balai Perbenihan Perikanan Kelas A;
2. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
3. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I Kelas A;
4. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II Kelas A;
5. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III Kelas A;
6. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV Kelas A;
7. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V Kelas A;
8. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI Kelas A; dan

9. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII Kelas A

3.5.1 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pengelolaan administrasi program, keuangan, asset, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum; (b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum; (c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; (d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; (e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; (f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Fokus pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat pada tahun anggaran 2025 adalah diarahkan pada Peningkatan SDM Teknis, Sosialisasi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur turunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan, Penataan lingkungan kantor, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan, pelaporan keuangan berbasis akrual dan sinkronisasi asset, Pengusulan kembali terkait ISO 9001:2015 dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan administrasi keuangan, penataan kepegawaian dan perkantoran lainnya.

3.5.2 Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (f)

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap pada tahun anggaran 2025 difokuskan pada : (a) penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan dimana terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan dan direhabilitasi antara lain: Pengembangan PPI PPI Mato dan Pelabuhan Perikanan Lafeu melalui Dana DAK dimana diusulkan pembangunan penahan gelombang, turap penahan tanah, dermaga, kolam pelabuhan, drainase, TPI Hiegenis, Fasilitas Air (tawar) Bersih, Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo), Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Peralatan dan Mesin Penunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur; (b) pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui perbaikan sistem data serta kegiatan restocking pada Perairan Umum Daratan (PUD) di Poso, Toli-toli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali; (c) Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap termasuk dalam rangka pengentasan kemiskinan di 12 kabupaten/kota, mengatasi rawan pangan melalui inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU) dan peningkatan produktifitas perikanan tangkap antara lain melalui Program *Smart Fishing* dan bantuan sarana prasarana bagi kelompok nelayan; (d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perikanan tangkap; (e) koordinasi dengan stakeholder terkait permasalahan perikanan tangkap (antara lain : ketersediaan BBM, kondisi cuaca, perijinan); (f) pelayanan kepelabuhanan; (g) Sosialisasi SeHAT Nelayan; (h) Bimtek SIMKADA; dan (i) dukungan administrasi pelaksanaan program kegiatan perikanan tangkap. Sampai dengan tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5% nelayan miskin (Data P3KE) dapat dibantu melalui program pengentasan kemiskinan.

3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP

Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP bertugas membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan.

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pengembangan Usaha Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

Fokus kegiatan bidang perikanan budidaya dan P2HP tahun 2024 adalah (1) pengelolaan dan pemuktahiran basis data kegiatan pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk didalamnya kegiatan perijinan; (2) Pengembangan Rumput Laut Kultur Jaringan dalam rangka peningkatan produksi dan kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan; (3) Pengembangan budidaya ikan air tawar melalui inovasi-inovasi, antara lain melalui penerapan bioflok dan biotren (bioflok masuk pesantren) yang juga dilakukan dalam rangka pengendalian Schistosomiasis di Kabupaten Poso dan Sigi; (4) Program Bantuan Sarana Produksi Perikanan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas; (5) Dukungan Peningkatan Infrastruktur UPT Perbenihan; (6) Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Kesehatan Ikan; (7) Peningkatan Kapasitas Pokdakan Budidaya melalui CBIB dan CPIB; (8) Dukungan Keamanan Pangan Hasil Perikanan; (9) Penguatan Kelembagaan Poklamsar serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan melalui bantuan sosial dan rehab ruang pengolahan PMHP; (10) Penyediaan sarana CCS Pendukung Produksi, antara lain dengan Penyediaan ice storage pada PPI Paranggi dan PPI Mato; (11) Peningkatan Fasilitasi SKP dan Ekspor Hasil Perikanan; (13) Kampanye Gemarikan dalam rangka penurunan stunting dan (14) Dukungan bagi Program Pengentasan Stunting dan Penurunan Daerah Rawan Pangan.

3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut

Tugas bidang pengelolaan ruang laut adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan

pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Rencana fokus kegiatan tahun 2025 adalah (a) Sosialisasi Perda terkait Bidang Kelautan; (b) Inventarisasi Data Existing Pemanfaatan RL; (c) Kegiatan Pengelolaan RL sampai dengan 12 Mil; (d) Rehab Terumbu Karang dan Penanaman mangrove; (e) Pengadaan sarana prasarana penanganan sampah laut (f) Pemetaan Sebaran Ekosistem Terumbu Karang dan Mangrove; (g) Fasilitasi Perijinan termasuk verifikasi lapangan terkait Perijinan; (h) Survey Kondisi Existing Pemanfaatan RL; (i) Sosialisasi Sistem Kadaster Laut dalam Pemanfaatan RL; (j) Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir serta pelibatan dan penguatan kelembagaan diantaranya melalui Pelatihan terkait Bulan Cinta Laut bagi Masyarakat Pesisir; (k) Penanganan Pencemaran di wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (l) Monitoring biofisik dan sosek kawasan konservasi; dan (m) Pemberdayaan dan Fasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat pesisir.

3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis. dan monitoring. evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Rencana fokus kegiatan tahun 2025 bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah (a) pelaksanaan gelar operasi; (b) pembinaan kelompok masyarakat pengawas; (c) rehabilitasi sarana prasarana pengawasan; serta (d) peningkatan SDM Pengawas.

3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPT Perbenihan Perikanan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas. di bidang Perbenihan Perikanan dengan fungsi : (a) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Perbenihan Perikanan; (b) Melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi dibidang Perbenihan dan Budidaya Perikanan; (c) Melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang dinas di bidang Perbenihan perikanan; (d) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Perbenihan perikanan; dan (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPT Perbenihan Perikanan tahun 2025 adalah (1) perikanan tawar fokus pada komoditas ketahanan pangan: (a) Mas (b) Nila dan (c) Lele dengan cara perbaikan mutu induk dan benih antara lain melalui perbanyak induk ikan air tawar, teknologi produksi massal benih di BBIS Tulo, Kalawara, Tonusu, Wuasa, Palolo dan penerapan teknologi budidaya di unit perbenihan; (2) perikanan payau pada komoditas udang vanname dengan: peningkatan kualitas benih dan produksi udang vaname pada Instalasi Mamboro, BBIP Kampal dan Tambak Tindaki serta peningkatan kapasitas SDM Teknis; serta (3) pengembangan inovasi-inovasi.

3.5.7 UPTD PMHP

Mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (2) Pelaksanaan Tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (3) Pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (4) Melaksanakan Pembangunan. Pengembangan. Pemeliharaan. pendayagunaan dan Pengawasan dan Pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPTD PMHP tahun 2025 adalah (a) Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar; (b) Pembinaan penerapan GMP dan SSOP bagi “Poklahsar”; (c) Monitoring penerapan dan

pengujian mutu hasil perikanan; (d) Penerapan mutu dan bimtek yang memenuhi SNI; (e) inovasi pengolahan produk hasil perikanan; dan (f) peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

3.5.8 UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII

- 1) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I; dengan wilayah kerja meliputi PPI Donggala dan Kawasan Konservasi Kabupaten Donggala;
- 2) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II; dengan wilayah kerja meliputi PPI Paranggi dan Kawasan Konservasi Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-una;
- 3) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III; dengan wilayah kerja meliputi PPI Pagimana dan Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai;
- 4) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV; dengan wilayah kerja meliputi PPI Kolonedale dan Kawasan Konservasi Kabupaten Morowali Utara;
- 5) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V; dengan wilayah kerja meliputi PPP Ogotua dan Kawasan Konservasi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
- 6) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI; dengan wilayah kerja meliputi PPI Mato dan Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut
- 7) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII; dengan wilayah kerja meliputi PPI Lafeu dan Kawasan Konservasi Kabupaten Morowali;

Fokus kegiatan tahun 2025 UPT Wilayah adalah:

- Peningkatan SDM Aparatur
- Peningkatan pelayanan kepelabuhanan
- Dukungan operasional dan administrasi pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi
- Pemeliharaan sarana dan prasarana serta infrastruktur Pelabuhan Perikanan Donggala, Ogotua, Paranggi, Kolonedale, Pagimana, Salakan dan Mato
- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi
- Pengembangan inovasi

BAB IV PENUTUP

Pembangunan Kelautan dan Perikanan belakangan ini mendapat perhatian yang cukup besar baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: (1) terbatasnya BBM bersubsidi, pupuk, pakan dan benih berkualitas (2) kelistrikan; (3) moda transportasi; (4) prasarana jalan; (5) lemahnya SDM perikanan; (6) terbatasnya sarana produksi perikanan; (7) penurunan kualitas lingkungan; (8) masih terbatasnya anggaran yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan stakeholder terkait dimana sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas.

Akhirnya, keberhasilan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tidak terlepas dari sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara/aparat serta peran aktif masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mensukseskan tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan/program untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pula indikator dan target kinerja dapat dipahami secara utuh yang pada akhirnya segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
			2023	2020	Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t- n)	2021	2021	Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2020	2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan Administarsi yang tepat waktu %	100	100	100	100	1	100	100	100	1
	Program Peningkatan Sarpras Kerja Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah %	100	100	100	100	1	100	100	100	1
	Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi aparatur (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
	Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi aparatur (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi SKPD (%)	100	100	100	100	1	100	100	100	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reasalisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
										Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2020	2020	2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
	Program Pengembangan SDM KP	Lulusan STPL palu (Orang)	30	20	30	36	1,2	30	25	25	0,83
		Meningkatnya Jumlah Siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang)			30	30	1	30	37	37	
	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	251.686,04	171.115	228.286,66	196.519,30	0,86	239700	201.101,80	201.101,80	0,80
		Nilai Tukar Perikanan Tangkap (%)	108,76	114,56	107,68	112,98	1,05	108,22	98,11	98,11	0,90
		Jumlah Sentra KP yang ditingkatkan Infrastrukturnya	2	3	2	2	1,00	2	3	3	1,50
	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya (ton)	1.554.843	918.186,64	1.009.800	966.953,01	0,96	1.110.780	588.746,45	588.746,45	0,38
		Nilai Tukar Pembudidaya	97,82	85,83	85	87,11	1,02	86	100,01	100,01	1,02
		Jumlah Sentra KP yang ditingkatkan Infrastrukturnya	2	2,00	2	2,00	1,00	0	-	-	#VALUE!
	Program Penguatan daya saing produk perikanan	Nilai Eksport Hasil Perikanan (US\$)	3.784.000	3.630.475,19	3.200.000	3.763.124,02	1,18	3.520.000	3.763.124	3.763.124,02	0,99
		- Konsumsi Ikan	53,83	56,65	50,14	57,54	1,15	51,95	57,54	57,54	1,07
		Nilai Pembiayaan Usaha Hasil KP dan Lembaga Keangan Bank dan Bukan Bank (Rp. 1000)	120.000	143.918.843,11	100.000	1.462.459,46	14,62	110.000	613.691	613.691,06	5,11
	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan	- Persentase Kepatuhan (Compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku	65	59,71	55	59,71	1,09	60	85,71	85,71	1,32
		- Presentase Penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan	75	100	65	100	1,54	70	100	100	1,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t- n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2020	2020	2020	2020			2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68,00	27.376.941.143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68,00	27.376.941.143	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3,00	1.794.477.838	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3,00	1.794.477.838	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2,00	895.965.838	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2,00	895.965.838	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1,00	898.512.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1,00	898.512.000	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	18.802.193.373	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	18.802.193.373	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	16.962.068.973	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	16.962.068.973	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	1.625.420.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	1.625.420.400	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1,00	78.912.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1,00	78.912.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1,00	87.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1,00	87.480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (laporan)	1,00	48.312.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (laporan)	1,00	48.312.000	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	300.924.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	300.924.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	170,00	175.995.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	170,00	175.995.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (org)	3,00	124.929.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	3,00	124.929.000	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	1.997.929.328	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	1.997.929.328	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	1.472.039.216	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	1.472.039.216	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	240.888.613	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	240.888.613	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1,00	285.001.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1,00	285.001.500	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (laporan)	1,00	450.000.000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (laporan)	1,00	450.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	1,00	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	1,00	450.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	1.873.935.200	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	1.873.935.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1,00	162.232.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1,00	162.232.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	748.748.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	748.748.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	962.955.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	962.955.000	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	2.157.481.405	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	2.157.481.405	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48,00	1.039.919.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48,00	1.039.919.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48,00	436.676.280	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48,00	436.676.280	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5,00	680.885.725	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5,00	680.885.725	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11 kab/1 kota	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	3.995.554.832	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11 kab/1 kota	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	3.995.554.832	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	11 kab/ 1 kota	<i>Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)</i>	80,00	2.363.803.000	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	11 kab/ 1 kota	<i>Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)</i>	80,00	2.363.803.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen	1,00	80.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen	1,00	80.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4 KKP	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	668.757	1.233.803.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4 KKP	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	668.757	1.233.803.000	
		4 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1.502.512			4 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1.502.512		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	4.019	900.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	4.019	900.000.000	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	150.000.000	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	150.000.000	
	<i>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	290.000.000	<i>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	290.000.000	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	1,00		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	1,00		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	100.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	100.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	90.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	90.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	50.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	50.000.000	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	11 kab/ 1 kota	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1,00	50.000.000	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	11 kab/ 1 kota	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1,00	50.000.000	
	<i>Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	1.341.751.832	<i>Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	1.341.751.832	
			Produksi Garam (ton)	160,00				Produksi Garam (ton)	160,00		
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	250,00	441.751.832	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	250,00	441.751.832	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3,00	450.000.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3,00	450.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <i>(orang)</i>	230,00	150.000.000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <i>(orang)</i>	230,00	150.000.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2,00	300.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2,00	300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253.705,54	27.473.444.639	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253.705,54	27.473.444.639	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Nelayan	104,00			12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Nelayan	104,00		
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	11 kab/ 1 kota	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan <i>biologis yang aman (%)</i>	< 50%	19.899.885.474	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	11 kab/ 1 kota	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan <i>biologis yang aman (%)</i>	< 50%	19.899.885.474	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11 kab/ 1 kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil <i>(Dokumen)</i>	12	858.244.196	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11 kab/ 1 kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil <i>(Dokumen)</i>	12	858.244.196	
		11 kab/ 1 kota	Produksi perikanan kelompok nelayan (Kg)	735.746			11 kab/ 1 kota	Produksi perikanan kelompok nelayan (Kg)	735.746		
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut <i>samaai dengan 12 Mil (unit)</i>	1	162.393.473	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut <i>samaai dengan 12 Mil (unit)</i>	1	162.393.473	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil <i>(unit)</i>	240,00	18.879.247.806	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut <i>samaai dengan 12 Mil (unit)</i>	240,00	18.879.247.806	
		11 kab/ 1 kota	Persentase bina kelompok nelayan (%)	87,46			11 kab/ 1 kota	Persentase bina kelompok nelayan (%)	87,46		
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawu, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	5 kabupaten	Produksi Perikanan PUD (ton)	3.017,48	328.910.033	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawu, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	5 kabupaten	Produksi Perikanan PUD (ton)	3.017,48	328.910.033	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat <i>(Dokumen)</i>	5	328.910.033	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat <i>(Dokumen)</i>	5	328.910.033	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5 kabupaten	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)								
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100,00	149.333.509	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100,00	149.333.509	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia <i>(dokumen)</i>	1,00	149.333.509	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia <i>(dokumen)</i>	1,00	149.333.509	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	11 Kab	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8,00	7.095.315.624	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	11 Kab	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8,00	7.095.315.624	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	11 kab/ 1 kota	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan <i>(Pelabuhan Perikanan)</i>	1,00	1.000.000.000				1,00	1.000.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2,00	6.095.315.624	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2,00	6.095.315.624	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.316.226,79	4.646.000.211	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.316.226,79	4.646.000.211	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,51			12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,51		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>	100,00	35.000.000	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>	100,00	35.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	35.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	35.000.000	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)</i>	100,00	35.000.000	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)</i>	100,00	35.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	35.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	35.000.000	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12	2.576.000.211	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12	2.576.000.211	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	13 Kab	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	5,00	400.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	13 Kab	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	5,00	400.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	101,00	2.126.000.211	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	101,00	2.126.000.211	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1,00	50.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1,00	50.000.000	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	13	2.000.000.000	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	13	2.000.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	9,00	600.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	9,00	600.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	132,00	1.400.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	132,00	1.400.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	7.205.885,00	2.225.400.094	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	7.205.885,00	2.225.400.094	
		12 kab/ 1 kota	Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp juta -)	1.200.000,00			12 kab/ 1 kota	Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp juta -)	1.200.000,00		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100,00	159.001.387	<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100,00	159.001.387	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	1	60.000.000	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (Rekomendasi)	1	60.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1,00	99.001.387	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1,00	99.001.387	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan (unit)	120,00	538.399.169	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan (unit)	120,00	538.399.169	
		12 kab/ 1 kota	Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)	62,00			12 kab/ 1 kota	Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)	62,00		
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (unit usaha)	25,00	538.399.169	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	25,00	538.399.169	
	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70,00	1.527.999.537	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70,00	1.527.999.537	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1,00	60.216.000	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1,00	60.216.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (unit usaha)	7,00	1.367.783.537	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (unit usaha)	7,00	1.367.783.537	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1,00	100.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1,00	100.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	50,00	6.719.889.695	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	50,00	6.719.889.695	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35,00	6.599.889.695	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35,00	6.599.889.695	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	1.098.116.442	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	1.098.116.442	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kenyahannya (unit)	20,00			11 kab/ 1 kota	Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kenyahannya (unit)	20,00		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	3.809.308.115	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	3.809.308.115	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	300,00			11 kab/ 1 kota	Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	300,00		
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	892.465.137	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	892.465.137	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhanannya (unit)	25			11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhanannya (unit)	25		
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)	40	800.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)	40	800.000.000	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk (kelompok)	40			11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk (kelompok)	40		
	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	5	120.000.000	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	5	120.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (dokumen)	1	40.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1	40.000.000	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kenyataannya (unit)	20			11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kenyataannya (unit)	20		
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1	40.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1	40.000.000	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kenyataannya (Unit)	8			11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kenyataannya (Unit)	8		
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	40.000.000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	40.000.000	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)	6			11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)	6		
	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				5.839.459.145	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				5.839.459.145	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	4.119.459.145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	4.119.459.145	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	1.169.640.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	1.169.640.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	1.169.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	1.169.640.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)	1,00	157.073.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)	1,00	157.073.400	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1,00	157.073.400	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1,00	157.073.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	192.960.629	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	192.960.629	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	192.960.629	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	192.960.629	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	1.793.015.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	1.793.015.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	715.715.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	715.715.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	1.077.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	1.077.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	806.770.116	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	806.770.116	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13,00	99.265.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13,00	99.265.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	4,00	707.504.616	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	4,00	707.504.616	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	4,90	1.720.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	4,90	1.720.000.000	
		UPTD Perbenihan	Target PAD (Rp1000)	2.093.000,00			UPTD Perbenihan	Target PAD (Rp1000)	2.093.000,00		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1,00	120.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1,00	120.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1,00	50.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1,00	50.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1,00	50.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1,00	50.000.000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1,00	20.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1,00	20.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	UPTD Perbenihan	Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)	35.400,00	1.600.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	UPTD Perbenihan	Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)	35.400,00	1.600.000.000	
		UPTD Perbenihan	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	800,00			UPTD Perbenihan	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	800,00		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	7,00	1.200.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	7,00	1.200.000.000	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5,00	400.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5,00	400.000.000	
	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				2.293.702.104	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				2.293.702.104	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	1.543.702.104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	1.543.702.104	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	500.688.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	500.688.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	500.688.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	500.688.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	166.008.021	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	166.008.021	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	59.179.371	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	59.179.371	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	16.738.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	16.738.650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1,00	90.090.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1,00	90.090.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	669.440.770	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	669.440.770	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	143.143.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	143.143.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	86.872.770	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	86.872.770	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	439.425.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	439.425.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	207.565.313	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	207.565.313	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9,00	207.565.313	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9,00	207.565.313	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	80,00	750.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	80,00	750.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	11,00	750.000.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	11,00	750.000.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5,00	350.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5,00	350.000.000	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka	6,00	400.000.000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka	6,00	400.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				4.240.056.872	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				4.240.056.872	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	3.750.056.872	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	3.750.056.872	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	776.682.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	776.682.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	776.682.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	776.682.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	93.208.752	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	93.208.752	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	93.208.752	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	93.208.752	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	232.636.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	232.636.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (rakat)	1,00	232.636.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (rakat)	1,00	232.636.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	2.423.260.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	2.423.260.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	1.761.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	1.761.760.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	661.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	661.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	224.269.320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	224.269.320	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	10,00	224.269.320	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	10,00	224.269.320	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	4.254.271,88	490.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	4.254.271,88	490.000.000	
			PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	2.700.000,00				PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	2.700.000,00		
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil I) (SPB)	2.700,00	230.000.000	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil I) (SPB)	2.700,00	230.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)	2,00	260.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)	2,00	260.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	187.458,00	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	187.458,00	200.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	8,00	60.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	8,00	60.000.000	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				2.450.836.412	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				2.450.836.412	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	1.960.836.412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	1.960.836.412	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	406.296.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	406.296.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	406.296.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	406.296.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	192.188.772	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	192.188.772	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1,00	192.188.772	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1,00	192.188.772	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	45.216.825	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	45.216.825	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	45.216.825	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	45.216.825	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1,00	450.000.000				1,00	450.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	450.000.000				1,00	450.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	576.362.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	576.362.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	192.692.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	192.692.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	383.670.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	383.670.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	290.772.315	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	290.772.315	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	6,00	39.672.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	6,00	39.672.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	8,00	251.100.315	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	8,00	251.100.315	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	1.906.370,00	490.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	1.906.370,00	490.000.000	
			PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	129.433,51				PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	129.433,51		
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil II) (SPB)	833,00	230.000.000	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil II) (SPB)	833,00	230.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah II (pelabuhan)	2,00	260.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah II (pelabuhan)	2,00	260.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4.400,00	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4.400,00	200.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7,00	60.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7,00	60.000.000	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				2.729.374.582	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				2.729.374.582	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	2.239.374.582	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	2.239.374.582	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	450.353.790	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	450.353.790	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	408.348.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	408.348.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1,00	42.005.790	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1,00	42.005.790	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	87.803.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	87.803.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	56.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	56.700.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	22.012.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	22.012.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	9.090.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	9.090.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1,00	207.530.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1,00	207.530.500	
	Pengadaan Mebel	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	1,00	27.530.500	Pengadaan Mebel	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	1,00	27.530.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung \ Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung \ Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	150.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	1.212.706.682	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	1.212.706.682	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1,00	24.580.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1,00	24.580.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	715.715.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	715.715.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	66.060.882	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	66.060.882	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	406.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	406.350.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	280.980.510	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	280.980.510	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2,00	48.256.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2,00	48.256.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	108.175.560	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	108.175.560	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1,00	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1,00	90.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	755.700,00	490.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	755.700,00	490.000.000	
			PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	562.000,00				PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	562.000,00		
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III) (SPB)	148,00	230.000.000	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III) (SPB)	148,00	230.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)	2,00	260.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)	2,00	260.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13.113,00	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13.113,00	200.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7,00	60.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7,00	60.000.000	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				1.757.883.081	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				1.757.883.081	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	1.267.883.081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	1.267.883.081	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	284.749.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	284.749.200	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	284.749.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	284.749.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	132.027.725	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	132.027.725	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	132.027.725	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	132.027.725	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	510.538.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	510.538.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	308.308.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	308.308.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	202.230.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	202.230.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	340.568.156	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	340.568.156	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	4,00	306.019.406	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	4,00	306.019.406	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	1.532.461,66	490.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	1.532.461,66	490.000.000	
			PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	218.545,40				PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	218.545,40		
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)	2,00	230.000.000	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)	2,00	230.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	200.000.000	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)	2,00	260.000.000	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)	2,00	260.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8.300,94	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8.300,94	200.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6,00				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6,00		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	6,00	60.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	6,00	60.000.000	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL TELUK TOMINI				650.000.000	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL TELUK TOMINI				650.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	410.950.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	410.950.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	150.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	29.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	29.880.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	239.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	239.049.250	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	129.049.250	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	129.049.250	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	99.049.250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	99.049.250	
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12			1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	30.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	30.000.000	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	110.000.000	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	110.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orange)	10,00	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orange)	10,00	30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	40.000.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	40.000.000	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)	30,00	40.000.000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)	30,00	40.000.000	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DOBOTO				650.000.000	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DOBOTO				650.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	500.950.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	500.950.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1,00	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1,00	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	240.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	240.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	29.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	29.880.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00	149.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00	149.049.250	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	64.027.500	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	64.027.500	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	95.536,78	44.027.500	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	95.536,78	44.027.500	
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	60.042,72			1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	60.042,72		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	2,00	20.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	2,00	20.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	85.021.750	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	85.021.750	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orange)	10,00	20.000.000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orange)	10,00	20.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	25.021.750	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	25.021.750	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)	30,00	40.000.000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)	30,00	40.000.000	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL MOROWALI				650.000.000	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL MOROWALI				650.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	410.950.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	410.950.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	150.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1,00	29.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1,00	29.880.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	34.548.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00	239.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00	239.049.250	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	129.049.250	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	129.049.250	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	99.049.250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	99.049.250	
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12			1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	30.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	30.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	110.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	110.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10,00	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10,00	30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	40.000.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	40.000.000	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30,00	40.000.000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30,00	40.000.000	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL BANGGAI DALAKA				650.000.000	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL BANGGAI DALAKA				650.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	410.950.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	410.950.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	50.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (oro)	1,00	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (oro)	1,00	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	150.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	90.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	116.522.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	22.022.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	94.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	64.428.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	29.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	29.880.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	34.548.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	34.548.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	239.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	239.049.250	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	129.049.250	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	129.049.250	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	99.049.250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	99.049.250	
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	856.649, 13			1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	856.649, 13		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	30.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	30.000.000	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	110.000.000	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	110.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orange)	10,00	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orange)	10,00	30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	40.000.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	40.000.000	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)	30,00	40.000.000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)	30,00	40.000.000	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode/ Tahun : 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	68,00	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)	3,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)	1,00	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	1	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1,00	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	170,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	3,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1,00	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Palu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	1,00	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	48,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11 kab/1 kota	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	11 kab/ 1 kota	<i>Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)</i>	<i>80,00</i>	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	1,00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	4 KKP	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	668.757	
		4 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1.502.512	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	4.019	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	80	
	<i>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	100	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	1,00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	11 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1,00	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	11 kab/ 1 kota	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	1,00	
	<i>Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100	
			Produksi Garam (ton)	160,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	250,00	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	3,00	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	230,00	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253.705,54	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Nelayan	104,00	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	11 kab/ 1 kota	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	< 50%	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11 kab/ 1 kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	12	
		11 kab/ 1 kota	Produksi perikanan kelompok nelayan (Kg)	735.746	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	11 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	240,00	
		11 kab/ 1 kota	Persentase bina kelompok nelayan (%)	87,46	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	5 kabupaten	Produksi Perikanan PUD (ton)	3.017,48	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5 kabupaten	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	11 kab/ 1 kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	100,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)	1,00	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	11 Kab	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)	8,00	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	11 kab/ 1 kota	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	1,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	2,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.316.226,79	
		12 kab/ 1 kota	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	101,51	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>	100,00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)	100,00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	13 Kab	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	5,00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	101,00	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1,00	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	13	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	9,00	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	132,00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	7.205.885,00	
		12 kab/ 1 kota	Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp.juta.-)	1.200.000,00	
	<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	100,00	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1	12 kab/ 1 kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/	1	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1,00	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	120,00	
		12 kab/ 1 kota	Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)	62,00	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (unit usaha)	25,00	
	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	12 kab/ 1 kota	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	70,00	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1,00	
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)	7,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	1,00	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	50,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	35,00	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya (unit)	20,00	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	300,00	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhannya (unit)	25	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)	40	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina (kelompok)	40	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	11 kab/ 1 kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	5	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (unit)	20	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kebenarannya (Unit)	8	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	
		11 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)	6	
	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)	1,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	4,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	4,90	
		UPTD Perbenihan	Target PAD (Rp1000)	2.093.000,00	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	UPTD Perbenihan	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	1,00	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1,00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1,00	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1,00	
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	UPTD Perbenihan	Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)	35.400,00	
		UPTD Perbenihan	Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	800,00	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	7,00	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9,00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/ 1 kota	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	80,00	
	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	12 kab/ 1 kota	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	11,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5,00	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	12 kab/ 1 kota	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka	6,00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	10,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	4.254.271,88	
			PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	2.700.000,00	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil I) (SPB)	2.700,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)	2,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	187.458,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	8,00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	6,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	8,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	1.906.370,00	
			PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	129.433,51	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil II) (SPB)	833,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah II (pelabuhan)	2,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	4.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	1,00	
	Pengadaan Mebel	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	1,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung \ Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	755.700,00	
			PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	562.000,00	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III) (SPB)	148,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)	2,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	13.113,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	7,00	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	7,00	
	UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV				

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	4,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	1.532.461,66	
			PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	218.545,40	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)	2,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1,00	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)	2,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	8.300,94	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6,00	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil IV	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	6,00	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL TELUK TOMINI				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	
	Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10,00	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30,00	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DOBOTO				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)/Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	95.536,78	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	60.042,72	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	2,00	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10,00	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30,00	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL MOROWALI				
	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	3,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100,00	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	292.910,12	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10,00	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1,00	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	30,00	
	UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL BANGGAI DALAKA				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12 kab/ 1 kota	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	90,00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 kab/ 1 kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	1,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 kab/ 1 kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 kab/ 1 kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kab/ 1 kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 kab/ 1 kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kab/ 1 kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	2,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 KKP	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100,00	
	<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	1 KKP	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	80,00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 KKP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	191.073,57	
		1 KKP	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	856.649, 13	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	3,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	100,00	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	10,00	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode/ Tahun : 2025
Prakiraan Maju : 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					94.348.542.810				114.789.704.579
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	68,00	27.376.941.143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70	31.934.143.327
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Palu	3,00	1.794.477.838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	2.709.481.476
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	2,00	895.965.838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	1.361.000.076
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	1,00	898.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.348.481.400
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Palu	1,00	18.802.193.373	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	19.722.255.573
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	1	16.962.068.973	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	16.962.068.973
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	1,00	1.625.420.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	2.438.130.600
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	1,00	78.912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	118.368.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	1,00	87.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	131.220.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Palu	1,00	48.312.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	72.468.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	Palu	1,00	300.924.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	451.386.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Palu	170,00	175.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175	263.992.500
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)	Palu	3,00	124.929.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3	187.393.500
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	Palu	1,00	1.997.929.328	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	2.849.690.070
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Palu	1,00	1.472.039.216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	2.060.854.902
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Palu	1,00	240.888.613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	361.332.919
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Palu	1,00	285.001.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	427.502.250
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	Palu	1,00	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	550.000.000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	Palu	1,00	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	550.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1,00	1.873.935.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	2.415.108.100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Palu	1,00	162.232.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	243.348.300
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Palu	1,00	748.748.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	823.622.800
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	Palu	1,00	962.955.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.348.137.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1,00	2.157.481.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	3.236.222.107
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Palu	48,00	1.039.919.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48,00	1.559.879.100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Palu	48,00	436.676.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48,00	655.014.420

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Palu	5,00	680.885.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,00	1.021.328.587
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	11 kab/1 kota	100,00	3.995.554.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	4.803.619.977
			<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	<i>Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)</i>	11 kab/ 1 kota	80,00	2.363.803.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90	2.833.803.000
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	1,00	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	100.000.000
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)	4 KKP	668.757	1.233.803.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		722.514	1.433.803.000
				Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	4 KKP	1.502.512				1.502.512	
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	11 kab/ 1 kota	4.019	900.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.180	1.000.000.000
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	80	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	300.000.000
			<i>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)	11 kab/ 1 kota	100	290.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	440.000.000
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	11 kab/ 1 kota	1,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
			Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)	11 kab/ 1 kota	1,00	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	11 kab/ 1 kota	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	140.000.000
		Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	11 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
		<i>Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil</i>	12 kab/ 1 kota	100	1.341.751.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	1.529.816.977
			Produksi Garam (ton)	160,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180,00	
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	250,00	441.751.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,00	529.816.977
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	3,00	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	450.000.000
		Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11 kab/ 1 kota	230,00	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		270,00	150.000.000
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 kab/ 1 kota	2,00	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	400.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/ 1 kota	253.705,54	27.473.444.639	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		254.212,95	32.688.782.282
			Nilai Tukar Nelayan	104,00				105,00	
		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	11 kab/ 1 kota	< 50%	19.899.885.474			< 50%	22.889.874.022

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	12	858.244.196	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	944.068.615
				Produksi perikanan kelompok nelayan (Kg)	11 kab/ 1 kota	735.746		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		762.638,84	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	11 kab/ 1 kota	1	162.393.473	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	178.632.820
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	11 kab/ 1 kota	240,00	18.879.247.806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		280,00	21.767.172.586
			<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase bina kelompok nelayan (%)	11 kab/ 1 kota	87,46		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	
				Produksi Perikanan PUD (ton)	5 kabupaten	3.017,48	328.910.033	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.029,56	361.801.036
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5 kabupaten	5	328.910.033	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,00	361.801.036
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	5 kabupaten						
			<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	11 kab/ 1 kota	100,00	149.333.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	164.266.860
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)	11 kab/ 1 kota	1,00	149.333.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	164.266.860
			<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	<i>Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)</i>	11 Kab	8,00	7.095.315.624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,00	9.272.840.365
			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	11 Kab	1,00	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	500.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	11 Kab	2,00	6.095.315.624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	8.772.840.365

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	12 kab/ 1 kota	1.316.226,79	4.646.000.211	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.342.551,33	7.422.648.705
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	12 kab/ 1 kota	101,51		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		102,53	
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)	12 kab/1 kota	100,00	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	40.000.000
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	12 kab/ 1 kota	1	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	40.000.000
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)	12 kab/1 kota	100,00	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	40.000.000
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	12 kab/ 1 kota	1	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	40.000.000
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12 kab/1 kota	12	2.576.000.211	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	4.442.648.705
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	11 kab/ 1 kota			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	119.999.999
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	13 Kab	5,00	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,00	450.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	12 kab/ 1 kota	101,00	2.126.000.211	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120,00	3.492.648.706
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	12 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	380.000.000
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	12 kab/1 kota	13	2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,00	2.900.000.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	12 kab/ 1 kota	9,00	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,00	900.000.000
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	12 kab/ 1 kota	132,00	1.400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		142,00	2.000.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Olahan (Kg)	12 kab/ 1 kota	7.205.885,00	2.225.400.094	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.926.473,00	2.706.657.387
				Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp.juta,-)	12 kab/ 1 kota	1.200.000,00				1.300.000,00	
			<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)	12 kab/ 1 kota	100,00	159.001.387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	179.001.387
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	12 kab/ 1 kota	1	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	70.000.000
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	12 kab/ 1 kota	1,00	99.001.387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	109.001.387
			<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)</i>	12 kab/1 kota	120,00	538.399.169	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>		<i>130,00</i>	638.399.169
				<i>Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)</i>	12 kab/1 kota	62,00		<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>		64,00	

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (unit usaha)	12 kab/ 1 kota	25,00	538.399.169	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,00	638.399.169
			<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)	12 kab/ 1 kota	70,00	1.527.999.537	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	1.889.256.830
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	12 kab/ 1 kota	1,00	60.216.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	145.216.000
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)	12 kab/ 1 kota	7,00	1.367.783.537	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,00	1.544.040.830
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)	12 kab/ 1 kota	1,00	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	200.000.000
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)	12 kab/ 1 kota	50,00	6.719.889.695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60	7.919.725.110
			<i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</i>	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompetensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)	12 kab/ 1 kota	35,00	6.599.889.695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35	7.784.725.110
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	1,00	1.098.116.442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	1.298.116.442

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya (unit)	11 kab/ 1 kota	20,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	1,00	3.809.308.115	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	4.594.143.530
		Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	11 kab/ 1 kota	300,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	1,00	892.465.137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	992.465.137
		Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhannya (unit)	11 kab/ 1 kota	25		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)	11 kab/ 1 kota	40	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60	900.000.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina (kelompok)	11 kab/ 1 kota	40		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)	11 kab/ 1 kota	5	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	135.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (dokumen)	11 kab/ 1 kota	1	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	45.000.000
		Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (unit)	11 kab/ 1 kota	20		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25	

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	11 kab/ 1 kota	1	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1
				Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (Unit)	11 kab/ 1 kota	8		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9
			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	11 kab/ 1 kota	1	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1
				Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)	11 kab/ 1 kota	6		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6
			UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				5.839.459.145			7.164.956.654
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	Palu	90,00	4.119.459.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)</i>	12 kab/1 kota	1,00	1.169.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12 kab/ 1 kota	1,00	1.169.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00
			<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)</i>	12 kab/1 kota	1,00	157.073.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	157.073.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)</i>	12 kab/1 kota	1,00	192.960.629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	192.960.629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	1.793.015.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.864.586.500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	715.715.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	787.286.500
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	12 kab/ 1 kota			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	1.077.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.077.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	806.770.116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.210.155.174
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12 kab/ 1 kota	13,00	99.265.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,00	148.898.250
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (unit)	12 kab/ 1 kota	4,00	707.504.616	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,00	1.061.256.924
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)	UPTD Perbenihan	4,90	1.720.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,20	1.830.000.000
				Target PAD (Rp1000)	UPTD Perbenihan	2.093.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.224.000,00	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)	UPTD Perbenihan	1,00	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	80.000.000
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	UPTD Perbenihan	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	60.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	UPTD Perbenihan	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	20.000.000
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	UPTD Perbenihan	1,00	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)	UPTD Perbenihan	35.400,00	1.600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37.450,00	1.750.000.000
				Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)	UPTD Perbenihan	800,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perbenihan	7,00	1.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,00	1.300.000.000
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	UPTD Perbenihan	5,00	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,00	450.000.000
		UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)			2.293.702.104				3.008.435.519
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	Palu	90,00	1.543.702.104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92,00	2.208.435.519
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)</i>	Palu	1,00	500.688.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	751.032.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	Palu	1,00	500.688.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	751.032.000
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)</i>	Palu	1,00	166.008.021	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	243.094.094
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Palu	1,00	59.179.371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	82.851.119
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Palu	1,00	16.738.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	25.107.975
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Palu	1,00	90.090.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	135.135.000
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)</i>	Palu	1,00	669.440.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	902.961.455
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Palu	1,00	143.143.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	157.457.300
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	Palu	1,00	86.872.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	130.309.155
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	Palu	1,00	439.425.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	615.195.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Palu	1,00	207.565.313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	311.347.970
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Palu	9,00	207.565.313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,00	311.347.970
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)	12 kab/ 1 kota	80,00	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90,00	800.000.000
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)	12 kab/ 1 kota	11,00	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14,00	800.000.000
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	12 kab/ 1 kota	5,00	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,00	400.000.000
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka	12 kab/ 1 kota	6,00	400.000.000			7,00	400.000.000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				4.240.056.872				5.330.967.628
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	90,00	3.750.056.872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00	4.830.967.628
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	776.682.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.165.023.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	776.682.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.165.023.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	93.208.752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	139.813.128

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	93.208.752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	139.813.128
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	232.636.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	325.691.520
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	232.636.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	325.691.520
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	2.423.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	2.864.036.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	1.761.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.937.936.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	661.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	926.100.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	224.269.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	336.403.980
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	10,00	224.269.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,00	336.403.980
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	4.254.271,88	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.466.985,47	500.000.000
				PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	2.700.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil I) (SPB)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	2.700,00	230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.800,00	230.000.000
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1	1,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	200.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	2,00	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	270.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	187.458,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		203.612,00	200.000.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	7,00				8,00	
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	8,00	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,00	70.000.000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				2.450.836.412				3.100.810.618
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	90,00	1.960.836.412	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00	2.600.810.618
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	406.296.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	609.444.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	406.296.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	609.444.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	192.188.772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	288.283.158
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	192.188.772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	288.283.158
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	45.216.825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	67.825.238
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	45.216.825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	67.825.238
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	450.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	450.000.000
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)</i>	<i>UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II</i>	1,00	576.362.500	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>		<i>1,00</i>	<i>749.099.750</i>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	192.692.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	211.961.750
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	383.670.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	537.138.000
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)</i>	<i>UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II</i>	1,00	290.772.315	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>		<i>1,00</i>	<i>436.158.473</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	6,00	39.672.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,00	59.508.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	8,00	251.100.315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,00	376.650.473
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)	UPTD Pelabuhan	1.906.370,00	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.944.490,00	500.000.000
				PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	129.433,51		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		133.316,52	
			<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil II) (SPB)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	833,00	230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		858,00	230.000.000
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	200.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah II (pelabuhan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	2,00	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	270.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	4.400,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000,00	200.000.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	7,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,00	
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	7,00	60.000.000			7,00	70.000.000
			UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				2.729.374.582				3.463.881.723
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	90,00	2.239.374.582	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00	2.963.881.723
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	450.353.790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	675.530.685
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	408.348.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	612.522.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	42.005.790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	63.008.685
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	87.803.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	131.704.650
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	56.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	85.050.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	22.012.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	33.018.750
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	9.090.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	13.635.900

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	207.530.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	243.036.600
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	27.530.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	33.036.600
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung \ Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	180.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	1.212.706.682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	1.492.139.023
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	24.580.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	36.871.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	715.715.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	787.286.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	66.060.882	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	99.091.323
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	406.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	568.890.000
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)</i>	<i>UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3</i>	1,00	280.980.510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	421.470.765
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	2,00	48.256.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,00	72.384.300
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	3,00	108.175.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,00	162.263.340
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	3,00	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,00	51.823.125
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	135.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	755.700,00	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	791.685,00	500.000.000
			PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	562.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	562.000,00	
		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III) (SPB)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	148,00	230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	158,00	230.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	30.000.000
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	1,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	200.000.000
		<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	2,00	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,00	270.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	13.113,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.113,00	200.000.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	7,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,00	
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3	7,00	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,00	70.000.000
			UPT. PELABUHAN WILAYAH IV				1.757.883.081	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.245.075.649
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	90,00	1.267.883.081	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00	1.745.075.649
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	284.749.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	427.123.800
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	284.749.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	427.123.800
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	132.027.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	184.838.814
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	132.027.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	184.838.814
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	510.538.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	622.260.800
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	308.308.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	339.138.800
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	202.230.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	283.122.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	340.568.156	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	510.852.235
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	4,00	306.019.406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,00	459.029.110

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	3,00	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	51.823.125
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1.532.461,66	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.609.084,74	500.000.000
		PAD Pelabuhan Wilayah IV (Rp.1000)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	218.545,40		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		225.101,76	
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	2,00	230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	230.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	1,00	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	200.000.000
	<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	2,00	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,00	270.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	8.300,94	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.716,00	200.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	6,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,00	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4	6,00	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,00	70.000.000
		UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL TELUK TOMINI			650.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	12 kab/ 1 kota	90,00	410.950.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00	549.167.325
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)</i>	<i>12 kab/1 kota</i>	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)</i>	<i>12 kab/1 kota</i>	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	216.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	126.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	45.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	45.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	116.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	156.524.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	22.022.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	24.224.200
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	94.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	132.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	64.428.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	96.643.125
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	2,00	29.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	44.820.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	3,00	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	51.823.125
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	1 KKP	100,00	239.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	200.832.675
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	1 KKP	80,00	129.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85,00	90.832.675
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1 KKP	191.073,57	99.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		206.433	60.832.675
				Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1 KKP	292.910,12		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		292.910,12	
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	1 KKP	3,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	30.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	1 KKP	100,00	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	110.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	10,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,00	30.000.000
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	1,00	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	40.000.000
		Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	30,00	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,00	40.000.000
		UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DOBOTO			650.000.000				750.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)</i>	12 kab/ 1 kota	90,00	500.950.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92,00	684.167.325
				12 kab/1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	50.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	50.000.000
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)</i>	12 kab/1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	30.000.000
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)</i>	12 kab/1 kota	1,00	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	351.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	135.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	126.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	45.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,00	45.000.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	116.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	156.524.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	22.022.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	24.224.200
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	94.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	132.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	64.428.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	96.643.125
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	2,00	29.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	44.820.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	3,00	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	51.823.125
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	100,00	149.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	65.832.675
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	1 KKP	80,00	64.027.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80,00	45.832.675
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1 KKP	95.536,78	44.027.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		103.216,35	35.832.675
				Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1 KKP	60.042,72		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.042,72	
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	1 KKP	2,00	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	10.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	1 KKP	100,00	85.021.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	20.000.000
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1 KKP	10,00	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,00	20.000.000
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1 KKP	1,00	25.021.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1 KKP	30,00	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,00	
			UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL MOROWALI				650.000.000				750.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	12 kab/ 1 kota	90,00	410.950.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,00	549.167.325
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	12 kab/1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	216.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	126.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	45.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	45.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	116.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	156.524.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	22.022.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	24.224.200
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	94.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	132.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	64.428.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	96.643.125
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	1,00	29.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	44.820.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	3,00	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	51.823.125

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 KKP	100,00	239.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	200.832.675
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	1 KKP	80,00	129.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80,00	90.832.675
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1 KKP	191.073,57	99.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		206.433,00	60.832.675
				Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1 KKP	292.910,12		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		292.910,12	
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	1 KKP	3,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	30.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	1 KKP	100,00	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	110.000.000
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1 KKP	10,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,00	30.000.000
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1 KKP	1,00	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	40.000.000
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1 KKP	30,00	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,00	40.000.000
			UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL BANGGAI DALAKA				650.000.000				750.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan	12 kab/ 1 kota	90,00	410.950.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90,00	549.167.325
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12 kab/ 1 kota	1,00	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	50.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)	12 kab/1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	216.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	126.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	45.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 kab/ 1 kota	1,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	45.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	116.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	156.524.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	22.022.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	24.224.200
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	12 kab/ 1 kota	1,00	94.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	132.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12 kab/1 kota	1,00	64.428.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	96.643.125
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	2,00	29.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	44.820.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	12 kab/ 1 kota	2,00	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	51.823.125
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	1 KKP	100,00	239.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	200.832.675
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)	1 KKP	80,00	129.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80,00	90.832.675
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	1 KKP	191.073,57	99.049.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		206.432,71	60.832.675
				Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)	1 KKP	856.649, 13		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		856.649, 13	
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	1 KKP	3,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,00	30.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	1 KKP	100,00	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	110.000.000
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1 KKP	10,00	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,00	30.000.000
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	1 KKP	1,00	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,00	40.000.000

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2025

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Memajukan dan mensejahterahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan SDKP yang berkeadilan dan berkelanjutan						PDRB Perikanan		5,90	94.348.542.810	Dislutkan	Sulteng
						Penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan (%)		6,00			
	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik					Nilai SAKIP		84,00			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		68,00	27.376.941.143		Palu
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)		3,00	1.794.477.838		Palu
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)		2,00	895.965.838		Palu
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)		1,00	898.512.000		Palu
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	18.802.193.373		Palu
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)		1	16.962.068.973		Palu

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	1.625.420.400		Palu
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)		1,00	78.912.000		Palu
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)		1,00	87.480.000		Palu
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)		1,00	48.312.000		Palu
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	300.924.000		Palu
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)		170,00	175.995.000		Palu
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)		3,00	124.929.000		Palu
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	1.997.929.328		Palu
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	1.472.039.216		Palu
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	240.888.613		Palu

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		1,00	285.001.500		Palu
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)		1,00	450.000.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)		1,00	450.000.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	1.873.935.200		Palu
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		1,00	162.232.200		Palu
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	748.748.000		Palu
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	962.955.000		Palu
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	2.157.481.405		Palu
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		48,00	1.039.919.400		Palu
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		48,00	436.676.280		Palu
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		5,00	680.885.725		Palu

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan					Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		21,85			11 kab/1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100,00	3.995.554.832		11 kab/1 kota
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80,00	2.363.803.000		11 kab/ 1 kota
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen		1,00	80.000.000		11 kab/ 1 kota
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)		668.757	1.233.803.000		4 KKP
						Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		1.502.512			
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		4.019	900.000.000		11 kab/ 1 kota
					Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		80	150.000.000		11 kab/ 1 kota
					Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)		100	290.000.000		11 kab/ 1 kota
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)		1,00			11 kab/ 1 kota
					Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1,00	100.000.000		11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1,00	90.000.000		11 kab/ 1 kota
					Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1,00	50.000.000		11 kab/ 1 kota
					Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)		1,00	50.000.000		11 kab/ 1 kota
					Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100	1.341.751.832		12 kab/ 1 kota
						Produksi Garam (ton)		160,00			
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)		250,00	441.751.832		11 kab/ 1 kota
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)		3,00	450.000.000		11 kab/ 1 kota
					Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)		230,00	150.000.000		11 kab/ 1 kota
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)		2,00	300.000.000		11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan					Nilai Tukar Nelayan		102,5			12 kab/ 1 kota
	peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing					Produksi Perikanan (Ton)		1.569.932,33			12 kab/ 1 kota
						Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)		60,53			12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		253.705,54	27.473.444.639		12 kab/ 1 kota
						Nilai Tukar Nelayan		104,00			12 kab/ 1 kota
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)		< 50%	19.899.885.474		11 kab/ 1 kota
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		12	858.244.196		11 kab/ 1 kota
						Produksi perikanan kelompok nelayan (Kg)		735.746			11 kab/ 1 kota
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)		1	162.393.473		11 kab/ 1 kota
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)		240,00	18.879.247.806		11 kab/ 1 kota
						Persentase bina kelompok nelayan (%)		87,46			11 kab/ 1 kota
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi Perikanan PUD (ton)		3.017,48	328.910.033		5 kabupaten
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)		5	328.910.033		5 kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)					
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)		100,00	149.333.509		11 kab/ 1 kota
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (dokumen)		1,00	149.333.509		11 kab/ 1 kota
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)		8,00	7.095.315.624		11 Kab
					Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)		1,00	1.000.000.000		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)		2,00	6.095.315.624		11 Kab
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		1.316.226,79	4.646.000.211		12 kab/ 1 kota
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan		101,51			12 kab/ 1 kota
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)		100,00	35.000.000		
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1	35.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi (%)		100,00	35.000.000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1	35.000.000		12 kab/ 1 kota
					<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)		12	2.576.000.211		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)					11 kab/ 1 kota
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		5,00	400.000.000		13 Kab
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		101,00	2.126.000.211		12 kab/ 1 kota
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)		13	2.000.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)		9,00	600.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)		132,00	1.400.000.000		12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Olahan (Kg)		7.205.885,00	2.225.400.094		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
						Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp.juta,-)		1.200.000,00			12 kab/ 1 kota
					Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)		100,00	159.001.387		12 kab/ 1 kota
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)		1	60.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)		1,00	99.001.387		12 kab/ 1 kota
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)		120,00	538.399.169		12 kab/ 1 kota
						Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)		62,00			12 kab/ 1 kota
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (unit usaha)		25,00	538.399.169		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)		70,00	1.527.999.537		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)		1,00	60.216.000		12 kab/ 1 kota
					Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (unit usaha)		7,00	1.367.783.537		12 kab/ 1 kota
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)		1,00	100.000.000		12 kab/ 1 kota
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP					Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)		350,00			12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)		50,00	6.719.889.695		12 kab/ 1 kota
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompotensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)		35,00	6.599.889.695		12 kab/ 1 kota
					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	1.098.116.442		11 kab/ 1 kota
						Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya (unit)		20,00			11 kab/ 1 kota
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	3.809.308.115		11 kab/ 1 kota
						Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)		300,00			11 kab/ 1 kota
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	892.465.137		11 kab/ 1 kota
						Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhannya (unit)		25			11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)		40	800.000.000		11 kab/ 1 kota
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina (kelompok)		40			11 kab/ 1 kota
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)		5	120.000.000		11 kab/ 1 kota
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)		1	40.000.000		11 kab/ 1 kota
						Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (unit)		20			11 kab/ 1 kota
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)		1	40.000.000		11 kab/ 1 kota
						Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (Unit)		8			11 kab/ 1 kota
					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		1	40.000.000		11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)		6			11 kab/ 1 kota
					UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				5.839.459.145		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	4.119.459.145		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	1.169.640.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	1.169.640.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)		1,00	157.073.400		12 kab/ 1 kota
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)		1,00	157.073.400		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	192.960.629		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	192.960.629		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	1.793.015.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	715.715.000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1,00			12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	1.077.300.000		12 kab/ 1 kota
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)</i>		<i>1,00</i>	<i>806.770.116</i>		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		13,00	99.265.500		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		4,00	707.504.616		12 kab/ 1 kota
					<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</i>	Jumlah produksi benih ikan dan udang bermutu (juta benih)		4,90	<i>1.720.000.000</i>		
						Target PAD (Rp1000)		2.093.000,00			
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)		1,00	120.000.000		UPTD Perbenihan
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)		1,00	50.000.000		UPTD Perbenihan
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)		1,00	50.000.000		UPTD Perbenihan
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)		1,00	20.000.000		UPTD Perbenihan
					<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)		35.400,00	<i>1.600.000.000</i>		UPTD Perbenihan
						Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)		800,00			
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		7,00	1.200.000.000		UPTD Perbenihan

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5,00	400.000.000		UPTD Perbenihan
					UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				2.293.702.104		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	1.543.702.104		Palu
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	500.688.000		Palu
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	500.688.000		Palu
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	166.008.021		Palu
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	59.179.371		Palu
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	16.738.650		Palu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		1,00	90.090.000		Palu
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	669.440.770		Palu
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	143.143.000		Palu
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1,00	86.872.770		Palu
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	439.425.000		Palu
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	207.565.313		Palu
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		9,00	207.565.313		Palu
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase UMKM binaan yang telah menerapkan standar Mutu Hasil Perikanan (%)		80,00	750.000.000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)		11,00	750.000.000		12 kab/ 1 kota
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		5,00	350.000.000		12 kab/ 1 kota
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka		6,00	400.000.000		12 kab/ 1 kota
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				4.240.056.872		1 KKP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	3.750.056.872		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	776.682.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	776.682.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	93.208.752		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1,00	93.208.752		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	232.636.800		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	232.636.800		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	2.423.260.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	1.761.760.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	661.500.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	224.269.320		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		10,00	224.269.320		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)		4.254.271,88	490.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
						PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)		2.700.000,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil I) (SPB)		2.700,00	230.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	30.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		1,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)		2,00	260.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)		187.458,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		7,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		8,00	60.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 1
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				2.450.836.412		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	1.960.836.412		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	406.296.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	406.296.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	192.188.772		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)		1,00	192.188.772		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	45.216.825		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	45.216.825		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)		1,00	450.000.000		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		1,00	450.000.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	576.362.500		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	192.692.500		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	383.670.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	290.772.315		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		6,00	39.672.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		8,00	251.100.315		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)		1.906.370,00	490.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
						PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)		129.433,51			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil II) (SPB)		833,00	230.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	30.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		1,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah II (pelabuhan)		2,00	260.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)		4.400,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		7,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		7,00	60.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 2
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				2.729.374.582		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	2.239.374.582		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	450.353.790		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	408.348.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)		1,00	42.005.790		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	87.803.100		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	56.700.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1,00	22.012.500		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	9.090.600		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (laporan)		1,00	207.530.500		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)		1,00	27.530.500		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung \ Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		1,00	30.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		1,00	150.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	1.212.706.682		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		1,00	24.580.800		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	715.715.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1,00	66.060.882		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	406.350.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	280.980.510		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		2,00	48.256.200		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		3,00	108.175.560		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		3,00	34.548.750		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (unit)		1,00	90.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)		755.700,00	490.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
						PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)		562.000,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III) (SPB)		148,00	230.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	30.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		1,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)		2,00	260.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)		13.113,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		7,00			
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		7,00	60.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 3
					UPT. PELABUHAN WILAYAH IV				1.757.883.081		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	1.267.883.081		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	284.749.200		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	284.749.200		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	132.027.725		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	132.027.725		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	510.538.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	308.308.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	202.230.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	340.568.156		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		4,00	306.019.406		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		3,00	34.548.750		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)		1.532.461,66	490.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
						PAD Pelabuhan Wilayah IV		218.545,40			UPTD Pelabuhan
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)		2,00	230.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1,00	30.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		1,00	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)		2,00	260.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)		8.300,94	200.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		6,00			UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		6,00	60.000.000		UPTD Pelabuhan Perikanan Wil 4

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL TELUK TOMINI				650.000.000		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	410.950.750		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	150.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	90.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	116.522.000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	22.022.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	94.500.000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	64.428.750		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		2,00	29.880.000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		3,00	34.548.750		12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100,00	239.049.250		1 KKP
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80,00	129.049.250		1 KKP
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		191.073,57	99.049.250		1 KKP
						Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		292.910,12			1 KKP
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		3,00	30.000.000		1 KKP
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100,00	110.000.000		1 KKP
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10,00	30.000.000		1 KKP
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)		1,00	40.000.000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orange)		30,00	40.000.000		1 KKP
					UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DOBOTO				650.000.000		1 KKP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	500.950.750		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	240.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	90.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	90.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	116.522.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	22.022.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	94.500.000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	64.428.750		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		2,00	29.880.000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		3,00	34.548.750		12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	149.049.250		1 KKP
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80,00	64.027.500		1 KKP
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		95.536,78	44.027.500		1 KKP
						Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulaupulau kecil yang operasional (Ha)		60.042,72			1 KKP
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		2,00	20.000.000		1 KKP
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100,00	85.021.750		1 KKP
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10,00	20.000.000		1 KKP
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Kelompok)		1,00	25.021.750		1 KKP
					Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orang)		30,00	40.000.000		1 KKP
					UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL MOROWALI				650.000.000		1 KKP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	410.950.750		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (ore)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	150.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	90.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	116.522.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	22.022.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	94.500.000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	64.428.750		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1,00	29.880.000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		3,00	34.548.750		12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	239.049.250		1 KKP
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		80,00	129.049.250		1 KKP
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		191.073,57	99.049.250		1 KKP
						Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		292.910,12			1 KKP
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		3,00	30.000.000		1 KKP
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100,00	110.000.000		1 KKP
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10,00	30.000.000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)		1,00	40.000.000		1 KKP
					Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau-Pulau Kecil (Orang)		30,00	40.000.000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2025			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL BANGGAI DALAKA				650.000.000		1 KKP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan		90,00	410.950.750		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1,00	50.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1,00	150.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1,00	90.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1,00	30.000.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	116.522.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1,00	22.022.000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1,00	94.500.000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1,00	64.428.750		12 kab/ 1 kota

[illegible]